



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP

2024



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA BALIKPAPAN**





KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat petunjuk, rahmat dan hidayah-Nya jualah akhirnya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan.

Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2024 merupakan Tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 dan merupakan masa pelaksanaan tahun ketiga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 dan merupakan program kerja tahun ketiga Wali Kota terpilih.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan komitmen dan tekad untuk menginformasikan capaian kinerja organisasi secara Transparan dan Akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan.

Selanjutnya semoga laporan ini dapat menjadi bahan untuk monitoring dan evaluasi bagi kinerja DP3AKB, dengan harapan akan menjadi lebih baik, efektif dan efisien, dari seluruh aspek yaitu perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya, karena tantangan kedepan akan semakin banyak apalagi dengan kondisi Balikpapan sebagai Beranda IKN yang sudah diamanahkan untuk menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi DP3AKB Kota Balikpapan. Semoga bisa menjadi lebih baik.

Balikpapan, 28 Februari 2025
Kepala DP3AKB Kota Balikpapan

Ir. Heria Prisni



RINGKASAN EKSEKUTIF

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tujuan dan sasaran jangka menengah DP3AKB adalah “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender”, dalam rangka mendukung ketercapaian target kinerja salah indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan, dengan sasaran hasil yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya pengarustamaan gender, pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak.
2. Meningkatnya Kesertaan PUS ber KB (mCPR).
3. Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang, dan
4. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perubahan perjanjian kinerja, beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

- a. Memperkuat pemahaman perangkat daerah terkait PUG dalam perencanaan pembangunan dan pentingnya PPRG melalui kegiatan peningkatan kapasitas SDM perencana selaku Focal Point OPD serta memperkuat peran Perangkat Daerah Penggerak PUG (OPD Driver).
- b. Pelaksanaan pendampingan OPD dalam penyusunan anggaran yang responsive gender.
- c. Memperkuat kemitraan perangkat daerah dengan kelembagaan masyarakat dalam Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA),
- d. Perlindungan Khusus Anak dan Perlindungan Perempuan.



- e. Memperkuat peran kemitraan penyelenggaraan konsultasi public terkait capaian kinerja perangkat daerah yang memerlukan lintas sektor terkait.
- f. Penguatan kapasitas fasilitas kesehatan dan jejaring yang melayani KB.
- g. Memperkuat kerjasama dengan KUA se Kota Balikpapan dalam penyuluhan Calon Pengantin (CATIN).
- h. Memperkuat pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) anggota Kelompok Kegiatan (POKTAN) untuk ber KB.
- i. Peningkatan pemahaman pola asuh dan pendampingan balita, anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
- j. Peningkatan pemahaman pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
- k. Memperkuat komitmen aparaturnya kelurahan dalam penyediaan dan update data profil desa dan kelurahan (prodeskel) sebagai data dasar untuk peningkatan peran serta masyarakat.
- l. Meningkatkan keselarasan perencanaan dan pelaksanaan serta monitoring evaluasi dan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja OPD diantaranya:

a. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Keterbatasan kapasitas daerah dalam pengendalian penduduk serta Banyaknya penduduk luar Balikpapan yang migrasi ke kota Balikpapan karena faktor ekonomi apalagi terkait dengan isu penyangga sebagai Ibukota Negara
- Laju pertumbuhan penduduk cenderung meningkat dimana dominan disebabkan faktor migrasi.
- Masih tingginya angka Unmet Need di Kota Balikpapan;



- Masih rendahnya jumlah PUS yang menjadi peserta KB, dan menjadi anggota UPPKA
- Pemahaman PUS tentang kesertaan ber-KB dan pilihan alat kontrasepsi KB MKJP masih rendah
- Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait dan stakeholder/mitra kerja terkait permasalahan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk
- Masih tingginya Angka Stunting
- Belum optimalnya keluarga yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL serta UPPKA
- Belum semua sekolah membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).
- Belum optimalnya kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan tentang 8 fungsi keluarga
- Belum optimalnya PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di setiap Kecamatan, idealnya di satu kecamatan memiliki satu PPKS di setiap Balai Penyuluhan
- Belum semua Kecamatan memiliki Balai Penyuluhan yang menjadi pusat pelaksanaan kegiatan dan program Bangga Kencana
- Masih banyaknya remaja yang belum memahami tentang Kesehatan reproduksi
- Kurangnya pemodalan untuk pengembangan Kelompok UPPKA
- Masih tingginya angka Median Usia Kawin Pertama (MuKP) dan belum optimalnya pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan di kalangan remaja dan orang tua
- Jumlah Penyuluh KB yang setiap tahun berkurang tanpa adanya pengganti
- Kurangnya partisipasi dari Tokoh Agama (TOGA) dan Tokoh Masyarakat (TOMA) untuk menyukseskan Program Bangga Kencana
- Pembentukan dan Pembinaan terhadap Poktan dan IMP dalam mendukung ketahanan keluarga belum optimal dilaksanakan.



- Belum optimalnya pelibatan kelembagaan masyarakat untuk mendukung program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
- Cakupan data dan kualitas data yang belum optimal.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Belum adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan, Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dan Perda Kota Layak Anak
- Belum tersedianya data terpilah untuk kepentingan penyusunan perencanaan pembangunan yang responsive gender ;
- Belum meratanya tenaga/SDM Analisis Gender di seluruh OPD lingkup Pemerintah;
- Belum semuanya OPD menyusun anggaran yang berbasis Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender;
- Belum optimalnya upaya pembinaan potensi perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan;
- Meningkatnya aduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan masih adanya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual pada Anak
- Belum optimalnya pelibatan kelembagaan masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ;
- Masih minimnya kesadaran orang tua dan keluarga terkait upaya perlindungan anak ;
- Belum meratanya ketersediaan layanan konseling anak dan remaja di seluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan ;
- Belum optimalnya pemanfaatan waktu luang anak pada pengembangan minat dan bakat anak
- Belum ada Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak dan kurangnya sarana prasarana yang ramah anak



- Belum tersedianya layanan dan fasilitas bagi anak terlantar maupun anak yang berkebutuhan khusus hingga anak yang berhadapan dengan hukum
- Masih terdapat anak yang putus sekolah yang belum terfasilitasi dengan baik
- Diperlukannya dukungan kurikulum sekolah dengan muatan lokal untuk Perlindungan Anak
- Kurangnya Psikolog dalam pembinaan psikologis anak dilingkungan sekolah maupun yang berbasis Masyarakat
- Diperlukan peran aktif Masyarakat dalam rangka turut mengawasi tumbuh kembang anak dilingkungannya
- Belum adanya sanksi terhadap orang tua atas pembiaran terhadap anaknya
- Belum maksimalnya Perempuan Wirausaha
- Masih rendahnya keterwakilan Perempuan yang duduk di Parlemen
- Belum optimalnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi program terkait perwujudan Balikpapan sebagai Kota Layak Anak.
- Masih minimnya pemahaman keluarga tentang pola asuh anak

c. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Belum maksimalnya peran pokjandal posyandu di Kota Balikpapan;
- Belum maksimalnya kelurahan secara rutin mengupdate data dalam Evdeskel;
- Belum optimalnya Peran & Fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan di daerah;
- Minimnya Kelurahan yang memiliki profil kelurahan sesuai yang diarahkan Kemdagri (PRODESSEL)
- Teknologi Tepat Guna produk POSYANTEK belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- Kelembagaan masyarakat (LPM, Karang Taruna, RT) yang belum optimal peran dukungnya;
- SDM yang ada pada OPD tidak bisa optimal melaksanakan Fasilitas Tim Penggerak PKK Kota dalam upaya gerakan pemberdayaan



masyarakat dengan alasan keterbatasan jumlah personil OPD yang tidak sesuai dengan kompleknya 3 urusan wajib yang ditangani oleh Perangkat Daerah.

- Jumlah SDM yang terbatas dimana masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan SDM dan kondisi bezeting.

Realisasi anggaran merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian keuangan DP3AKB terhadap pagu dana yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian/Penetapan Kinerja, yaitu melalui pelaksanaan program/kegiatan yang sudah tercantum dalam DPA. Realisasi anggaran DP3AKB Kota Balikpapan tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja adalah sebesar **Rp. 34.924.358.198, 00** atau sebesar **90,80 %** dari Pagu Perangkat Daerah tahun 2024 sebesar **Rp 38.462.234.005,00**.



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran	xv
I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah	5
1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	11
1.6 Sistematika Penulisan	18
II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	19
2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	36
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	41
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	51 58
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	
3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	59
3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	62
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis	65
3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/ Standar Nasional/Internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja)	67
3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	68
3.2.6 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	80
3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	104
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2024	112



IV PENUTUP

A. Kesimpulan

120

B. Saran

121

LAMPIRAN

123



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pegawai DP3AKB Kota Balikpapan	9
Tabel 1.2. Hubungan Keterkaitan antara Urusan, Sasaran Strategis dan Program Prioritas	13
Tabel 2.1 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Urusan DP3AKB Kota Balikpapan Berdasarkan RPJMD Kota Balikpapan Periode 2021-2026	21
Tabel 2.2 Tujuan Sasaran dan Target Renstra Tahun 2021-2026	22
Tabel 2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	24
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan	39
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 / Perubahan	42
Tabel 2.6 Rencana Anggaran Belanja DP3AKB Tahun 2024	42
Tabel 3.1 Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja tahun 2023	51
Tabel 3.2 Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja DP3AKB Tahun 2024	52
Tabel 3.3 Predikat Capaian Kinerja	58
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	60
Tabel 3.5 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	63
Tabel 3.6 Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra	65
Tabel 3.7 Realisasi Kinerja yang mengacu pada Standar Nasional	67
Tabel 3.8 Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2024	69
Tabel 3.9 Analisis Capaian dan Solusi Perbaikan	70
Tabel 3.10 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	81
Tabel 3.11 Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) DP3AKB menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	104
Tabel 3.12 Komposisi / Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS) DP3AKB menurut tingkat pendidikan	105
Tabel 3.13 Jumlah asset yang dimiliki dan yang tidak terpakai	106
Tabel 3.14 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)	108
Tabel 3.15 Realisasi Anggaran DP3AKB Tahun 2024	112



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi	8
Gambar 1.2 Grafik Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin	10
Gambar 1.3 Grafik Data Pegawai Berdasarkan Golongan tahun 2024	10
Gambar 1.4 Grafik Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan	11
Gambar 1.5 Perwali No 27 Tahun 2019	74
Gambar 1.6 Dokumentasi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	75
Gambar 1.7 Screenshot Aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel)	78
Gambar 1.8 Screenshot Aplikasi Aplikasi Epdeskel	79
Gambar 1.9 Puspaga Kecamatan Balikpapan Timur	94
Gambar 1.10 Screenshot Aplikasi SIMAPAN dan LAPOR PAK!	98



DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021-2026
2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024
3. Laporan asil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP dari Inspektorat Tahun Sebelumnya



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan suatu perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif yang merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Para pemangku kepentingan yang terlibat dapat digolongkan menjadi 3 domain yaitu state atau lembaga pemerintahan yang terdiri dari eksekutif dan legislatif daerah, private atau swasta yaitu pelaku-pelaku dunia usaha baik perorangan maupun lembaga, society atau masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan di daerah. Setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Dalam hal ini, setiap daerah (provinsi, kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan pasal 5 ayat 2 UU No 25 Tahun 2004, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Dalam penyusunannya, RPJMD disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang. RPJMD merupakan sebuah dokumen



perencanaan yang bersifat strategik yang akan mengarahkan segenap sumber daya untuk mencapai visi pembangunan daerah. Selain itu, RPJMD adalah bagian dari komponen sistem akuntabilitas pemerintah daerah yang akan digunakan untuk mengukur kinerja pemerintahan. Mengingat pentingnya RPJMD bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, proses penyusunan RPJMD dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan peran para pemangku kepentingan pembangunan. Berdasarkan alasan inilah maka penyusunan RPJMD dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang holistik dan berkesinambungan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Pasal 1 menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tapahan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 33 menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerah, oleh sebab itu perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan berpedoman pada dokumen perencanaan lainnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagai OPD yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat selain melaksanakan tugas sesuai dengan tufoksinya, agar dapat memberikan pelayanan yang baik, pelayanan prima, akuntabilitas kinerja dan untuk mewujudkan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan



Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang merupakan salah satu faktor penentu untuk mewujudkan keinginan arah kebijakan pembangunan Kota Balikpapan setiap tahunnya.

1.2 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
- d. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;



- i. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- k. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
- m. Peraturan Walikota Balikpapan No. 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja DP3AKB Dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024.

b. Tujuan

- ✓ Untuk memberikan informasi tentang capaian kinerja Kinerja DP3AKB berdasarkan target yang telah dituangkan sebelumnya.
- ✓ Untuk melakukan evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun Anggaran 2024.

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan



dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Balikpapan N0. 1 Tahun 2023 yang merupakan pengganti atas Peraturan Walikota Balikpapan Nomor N0. 3 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, mempunyai tujuan tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas:

- ✓ menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✓ mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- ✓ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melaksanakan

b. Fungsi:

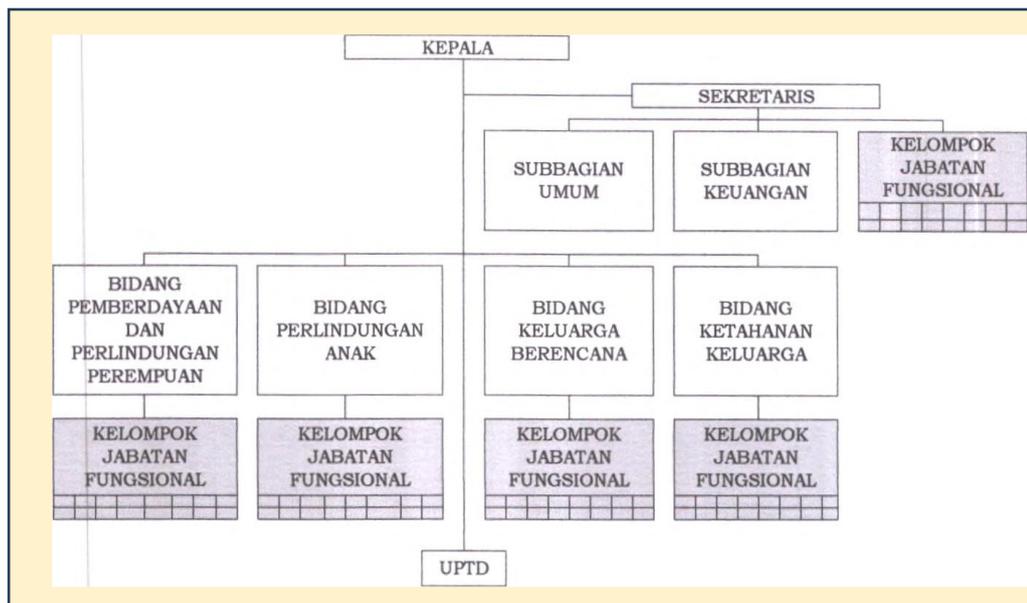
- ✓ perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- ✓ penyusunan dokumen perencanaan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- ✓ pengoordinasian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- ✓ pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;



- ✓ pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- ✓ pengoordinasian pelaksanaan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- ✓ pengoordinasian pelaksanaan program perlindungan perempuan;
- ✓ pengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan kualitas keluarga;
- ✓ pengoordinasikan pelaksanaan program pengelolaan sistem data gender dan anak;
- ✓ pengoordinasikan pelaksanaan program pemenuhan hak anak;
- ✓ pengoordinasikan pelaksanaan program perlindungan khusus anak;
- ✓ pengoordinasikan pelaksanaan program administrasi pemerintahan desa;
- ✓ pengoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- ✓ pengoordinasikan pelaksanaan program pengendalian penduduk;
- ✓ pengoordinasikan pelaksanaan program pembinaan keluarga berencana;
- ✓ pengoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
- ✓ pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- ✓ pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



c. Struktur Organisasi



Gambar 1.1.
Struktur Organisasi

Sumber : Peraturan Walikota Balikpapan No. 1 tahun 2022

d. Sumber Daya Manusia (Aparatur)

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, DP3AKB Kota Balikpapan memiliki tenaga PNS maupun Non PNS termasuk Penyuluh KB yang merupakan PNS Pemerintah Pusat namun ditempatkan di Kota Balikpapan untuk mendukung kinerja pusat dan daerah dalam pengelolaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Meskipun PKB adalah PNS Pemerintah Pusat/ BKKBN tetapi dalam penyusunan LkjiP ini ketenagaan PKB kami perhitungkan sebagai SDM yang mendukung kinerja DP3AKB mengingat dalam lampiran “ N “ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait kewenangan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam menjalankan urusan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah pendayagunaan Penyuluh KB sedangkan Pemerintah Pusat kewenangannya adalah pengelolaan PKB.

Jumlah pegawai Tahun 2024 dalam mendukung kinerja 3 (tiga) urusan yang menjadi kewenangan daerah adalah 77 (Tujuh Puluh Tujuh) orang terdiri dari 7 (tujuh) pejabat struktural di Kantor DP3AKB,



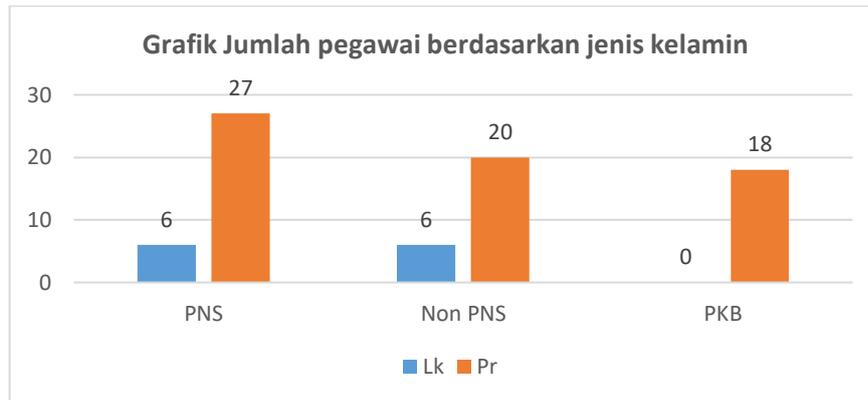
2 (dua) pejabat struktural di UPTD PPA, 7 (tujuh) pejabat fungsional, 17 staf pelaksana PNS, 9 (sembilan) staf pelaksana non PNS di Kantor DP3AKB, 9 (sembilan) staf non PNS di UPTD PPA, 5 (lima) staf non PNS di sekretariat TP PKK Kota, 3 (tiga) staf non PNS di Balai Penyuluhan dan 18 penyuluh KB (Organik Pemerintah Pusat).

Tabel 1.1. Pegawai DP3AKB Kota Balikpapan Tahun 2024

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				PPPK	Non PNS	Pendidikan					
	L	P	PNS						Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
			IV	III	II	I								
Kepala Dinas	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Sekretaris Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepala Bidang	1	3	3	1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
Kepala UPTD	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Kasubag	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Kasubag TU	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Jabatan Fungsional Tertentu	-	7	-	7	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-
Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana	5	12	-	11	6	-	-	-	1	9	2	5	-	-
Staf non PNS	6	20	-	-	-	-	-	26	2	9	1	11	2	1
Penyuluh KB (Pegawai Pusat)	-	18	5	6	7	-	-	-	1	7	9	1	-	-
Total	12	65	10	28	13	0	0	26	6	39	12	17	2	1
Jumlah Pegawai			51				-	26	77					

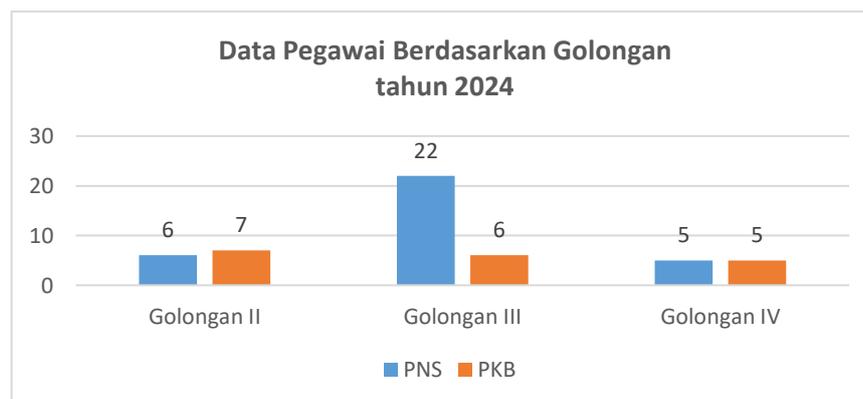
Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan Tahun 2024

Grafik Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, golongan dan tingkat pendidikan pada DP3AKB dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



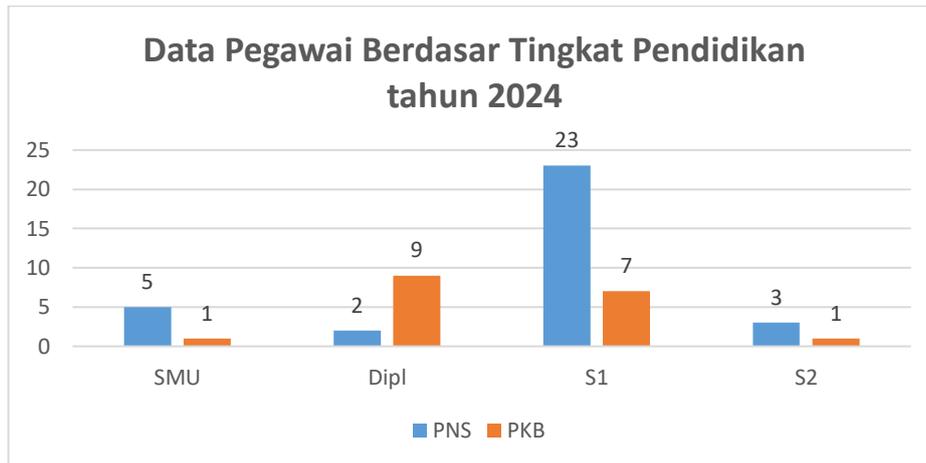
Gambar 1.2.
Grafik Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin
Sumber: Kepegawaian DP3AKB Tahun 2024

Dari grafik pada gambar 1.2 dapat diketahui jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin adalah untuk PNS terdiri dari enam orang laki-laki dan 27 orang perempuan, sedangkan pegawai non PNS terdiri dari enam orang laki-laki dan 20 orang perempuan, serta pegawai khusus PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) terdiri dari 18 orang perempuan, tidak terdapat PKB laki-laki.



Gambar 1.3.
Grafik Data Pegawai Berdasarkan Golongan tahun 2024
Sumber Data: Kepegawaian DP3AKB Tahun 2024

Dari grafik pada gambar 1.3 dapat diketahui jumlah pegawai berdasarkan golongan adalah untuk golongan II terdiri dari enam orang PNS dan tujuh orang PKB, sedangkan golongan III terdiri dari 22 orang PNS dan enam orang PKB, serta golongan IV terdiri dari lima orang PNS dan lima orang PKB.



Gambar 1.4.

Grafik Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan
Sumber Data : Kepegawaian DP3AKB Tahun 2024

Dari grafik pada gambar 1.4 dapat diketahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan adalah untuk SMU terdiri dari lima orang PNS dan satu orang PKB, sedangkan Diploma terdiri dari dua orang PNS dan sembilan orang PKB, Sarana (S1) terdiri dari 23 orang PNS dan tujuh orang PKB dan strata pasca sarjana (S2) terdiri dari tiga orang PNS dan satu orang PKB.

1.5 Aspek Strategis Dan Permasalahan Utama

Kondisi kelembagaan dan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan dapat ditinjau dari beberapa aspek antara lain :

1. Kelembagaan

Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Balikpapan Nomor No. 1 Tahun 2023 yang merupakan pengganti atas Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.



2. Hasil Kerja

Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menangani tiga (3) urusan yaitu :

- a. Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; dan
- b. Urusan Pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- c. Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk mewujudkan hasil kerja yang diharapkan dalam implementasi program dan kegiatan yang mendukung 3 (tiga) urusan dimaksud adalah melalui perwujudan target Sasaran Strategis DP3AKB Kota Balikpapan pada tahun 2023 yang dapat dijelaskan per urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2. Hubungan Keterkaitan antara Urusan, Sasaran Strategis dan Program Prioritas

Urusan DP3AKB	Sasaran Strategis	Program Prioritas
Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	- Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan - Program Perlindungan Perempuan - Program Peningkatan Kualitas Keluarga - Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak - Program Pemenuhan Hak Anak - Program Perlindungan Khusus Anak
Urusan Pemerintahan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana.	- Meningkatnya Kesertaan PUS ber KB	- Program Pengendalian Penduduk - Program Pembinaan Keluarga Berencana - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)



Urusan DP3AKB	Sasaran Strategis	Program Prioritas
Urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	- Meningkatkan Kelurahan Kategori Berkembang	- Program Administrasi Pemerintahan Desa - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Non Urusan (Kesekretariatan)	- Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Sumber : DP3AKB Kota Balikpapan (2024)

3. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Permasalahan utama (Isu Strategis) yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada akhir tahun 2023 sebagai data awal pencapaian kinerja pada awal Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keterbatasan kapasitas daerah dalam pengendalian penduduk serta Banyaknya penduduk luar Balikpapan yang migrasi ke kota Balikpapan karena faktor ekonomi apalagi terkait dengan isu penyangga sebagai Ibukota Negara;

- Laju pertumbuhan penduduk cenderung meningkat dimana dominan disebabkan faktor migrasi
- Masih tingginya angka Unmet Need di Kota Balikpapan;
- Masih rendahnya jumlah PUS yang menjadi peserta KB, khususnya kesertaan KB pola MKJP
- Pemahaman PUS tentang kesertaan ber-KB dan pilihan alat kontrasepsi KB MKJP masih rendah
- Laju pertumbuhan penduduk cenderung meningkat dimana dominan disebabkan faktor migrasi
- Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait dan stakeholder/mitra kerja terkait permasalahan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk
- Masih tingginya Angka Stunting



- Belum optimalnya cakupan keluarga yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL
- Belum optimalnya cakupan remaja yang menjadi anggota PIK-R
- Belum optimalnya cakupan PUS Peserta KB yang menjadi anggota UPPKA
- Belum optimalnya cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan tentang 8 fungsi keluarga
- Belum optimalnya PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di setiap Kecamatan
- Belum semua Kecamatan memiliki Balai Penyuluhan yang menjadi pusat pelaksanaan kegiatan dan program Bangga Kencana
- Masih banyaknya remaja yang belum memahami tentang Kesehatan reproduksi
- Kurangnya pemodal untuk pengembangan Kelompok UPPKA
- Masih tingginya angka Median Usia Kawin Pertama (MuKP) di Kota Balikpapan yaitu sebesar 22,7 pada tahun 2023
- Jumlah Penyuluh KB yang setiap tahun berkurang tanpa adanya pengganti
- Kurangnya partisipasi dari TOGA dan TOMA untuk menyukseskan Program Bangga Kencana
- Cakupan data dan kualitas data yang belum optimal

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Belum adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan, Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dan Perda Kota Layak Anak
- Belum tersedianya data terpilah untuk kepentingan penyusunan perencanaan pembangunan yang responsive gender ;
- Belum meratanya tenaga/SDM Analisis Gender di seluruh OPD lingkup Pemerintah ;



- Belum semuanya OPD menyusun anggaran yang berbasis Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender;
- Belum optimalnya upaya pembinaan potensi perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan;
- Meningkatnya aduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan masih adanya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Belum optimalnya pelibatan kelembagaan masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Masih minimnya kesadaran orang tua dan keluarga terkait upaya perlindungan anak;
- Masih minimnya pemahaman keluarga tentang pola asuh anak dan remaja;
- Belum meratanya ketersediaan layanan konseling anak dan remaja di seluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan;
- Belum optimalnya pemanfaatan waktu luang anak pada pengembangan minat dan bakat anak
- Belum ada Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak dan kurangnya sarana prasarana yang ramah anak
- Belum tersedianya layanan dan fasilitas bagi anak terlantar maupun anak yang berkebutuhan khusus hingga anak yang berhadapan dengan hukum
- Masih terdapat anak yang putus sekolah yang belum terfasilitasi dengan baik
- Diperlukannya dukungan kurikulum sekolah dengan muatan lokal untuk Perlindungan Anak
- Kurangnya Psikolog dalam pembinaan psikologis anak dilingkungan sekolah maupun yang berbasis Masyarakat
- Diperlukan peran aktif Masyarakat dalam rangka turut mengawasi tumbuh kembang anak dilingkungannya
- Belum adanya sanksi terhadap orang tua atas pembiaran terhadap anaknya



- Belum maksimalnya Perempuan Wirausaha
- Masih rendahnya keterwakilan Perempuan yang duduk di Parlemen
- Belum optimalnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi program terkait perwujudan Balikpapan sebagai Kota Layak Anak.

c. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Belum maksimalnya peran pokjanel posyandu di Kota Balikpapan;
- Belum maksimalnya kelurahan secara rutin mengupdate data dalam Evdeskel;
- Belum optimalnya Peran & Fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan di daerah;
- Minimnya Kelurahan yang memiliki profil kelurahan sesuai yang diarahkan Kemendagri (PRODESKEKEL).
- Teknologi Tepat Guna produk POSYANTEK belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- Kelembagaan masyarakat (LPM, Karang Taruna, RT) yang belum optimal peran dukungannya;
- SDM yang ada pada OPD tidak bisa optimal melaksanakan Fasilitasi TP PKK Kota dalam upaya gerakan pemberdayaan masyarakat dengan alasan keterbatasan jumlah personil OPD yang tidak sesuai dengan kompleksnya 3 urusan wajib yang ditangani oleh Perangkat Daerah.



2.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKJIP DP3AKB Kota Balikpapan Tahun

2024 sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

1.6 Sistematika Penulisan

II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

3.1.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2026

3.1.3 Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

3.1.4 Realisasi Kinerja Mengacu pada Standar Nasional/ Lainnya

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

IV PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Pemerintah Kota Balikpapan menetapkan visi misi Kepala Daerah terpilih sebagai Visi misi Pemerintah Kota tahun 2021–2026 berikut penetapan dokumen RPJMD Kota Balikpapan yang akan dipergunakan sebagai panduan/ pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi DP3AKB Kota Balikpapan. Adapun Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam RPJMD Kota Balikpapan Periode Tahun 2021–2026 adalah:

a. Visi

“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman “.

b. Misi

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
4. Mewujudkan kota yang nyama dihuni yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke-2, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.

Sementara tujuan dan sasaran pembangunan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan pada tahun 2021-2026. Berpijak pada pemahaman yang akan dihadapi oleh perangkat daerah dalam mencapai visi dan misi



Kepala Daerah pada tahun 2021–2026, maka disepakati tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan pada tahun 2021– 2026 yang akan datang.

Adapun penjelasan singkat tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah DP3AKB Kota Balikpapan pada tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarusutamaan Gender

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan ke-2 RPJMD, yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing.

b. Sasaran

1. Meningkatkan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak
2. Meningkatkan Kesertaan PUS ber KB
3. Meningkatkan Kelurahan kategori berkembang;
4. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah .

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaiansasaran ke-5 RPJMD, yaitu meningkatnya kualitas pembangunan gender.



Tabel 2.1 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Urusan DP3AKB Kota Balikpapan Berdasarkan RPJMD Kota Balikpapan Periode 2021-2026

MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN	OPD
<p>Misi ke-2</p> <p>Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi</p>	<p>Tujuan ke-2</p> <p>Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat, dan Berdaya Saing</p>	<p>Sasaran ke-4</p> <p>Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis pengarusutamaan gender</p>	<p>Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Urusan Pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana</p>

Sumber : Renstra DP3AKB 2021-2026

Pada tabel dibawah ini disajikan tabel , tujuan, sasaran strategis dan target Renstra 2021-2026:



Tabel 2.2 Tujuan Sasaran dan Target Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Anggaran yang Responsif Gender		Persentase Anggaran yang responsif Gender	14,43%	17%	25%	35%	45%	60%
	Meningkatnya Jumlah RKA Perangkat Daerah yang disusun melalui mekanisme Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Prosentase RKA responsif Gender	2,34%	4%	8%	10%	15%	25%
	Meningkatnya Kesertaan PUS ber- KB	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevelence Rate/ mCPR)	70,61%	70,61%	70,63%	70,65%	70,65%	70,65%
	Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang	Persentase Kelurahan Kategori Bekembang	n/a	5,88%	11,76%	29,41%	44,12%	58,82%
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah DP3AKB	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah DP3AKB	n/a	75	76	77	78	79

Sumber : Renstra DP3AKB 2021-2026



Pada sub bab ini menyajikan program/ kegiatan/ sub kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan/ Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2024.

Pada Tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan terdapat 12 program, 27 kegiatan dan 59 sub kegiatan.

Adapun program / kegiatan / sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan / sasaran tersebut adalah sebagai berikut:



Tabel 2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Anggaran yang Responsif Gender	1. Meningkatnya Jumlah RKA Perangkat Daerah yang disusun melalui mekanisme Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Persentase Anggaran yang responsif Gender	25%	I. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten /Kota	1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
		Prosentase RKA responsif Gender	8%		2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2) Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 3) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 4) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik Hukum Sosial dan Ekonomi
				II. Program Perlindungan Perempuan	3. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	5) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
					4. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	6) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
					5. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	7) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota
				III. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	6. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				IV. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	7. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan	9) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
					Data di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	
				V. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	8. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	10) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota
					9. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	11) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
				VI. Program Perlindungan Khusus Anak	10. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	12) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Kewenangan Kabupaten/ Kota
					11. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	13) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
					12. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	14) Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
	2. Meningkatnya Kesertaan PUS ber-KB (mCPR)	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevelence Rate/ mCPR)	70,61%	VII. Program Pengendalian Penduduk	13. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15) Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
					dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jalur Nonformal dan Informal
	3.				14. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	16) Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 17) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 18) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
				VIII. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	15. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	19) Pengendalian Program KKBPK 20) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana 21) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok) 22) Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</p> <p>23) Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</p>
					16. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)	<p>24) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</p> <p>25) Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB</p> <p>26) Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)</p>
					17. Pengendalian dan Pendistribusian	27) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
					Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	28) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
						29) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
					18. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	30) Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
						31) Pembinaan Terpadu Kampung KB
						32) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
				IX. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	19. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	33) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat Generasi Berencana Kelanjutusiaan serta



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Pengelolaan Keuangan Keluarga) 34) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 35) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 36) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 37) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</p> <p>38) Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)</p>
					<p>20. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui</p>	<p>39) Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)</p> <p>40) Pendampingan keluarga berisiko stunting (termasuk</p>



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
					Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	remaja calon pengantin/calon pus, ibu hamil, pasca/kelahiran, baduta/balita)
	4. Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang	Persentase Kelurahan Kategori Berkembang	100%	X. Program Administrasi Pemerintahan Desa	21. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	41) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 42) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
				XI. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	22. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	43) Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 44) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 45) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 46) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 47) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
	5. Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah DP3AKB	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah DP3AKB	27,00	XII. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	23. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24. Administrasi Umum Perangkat Daerah	48) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 49) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50) Penyediaan Bahan Logistik kantor 51) Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan 52) Penyediaan Bahan/ Material



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						53) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					25. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					26. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						56) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					27. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
						58) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						59) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan



2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Untuk tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan *outcome* dan *output* pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan.

Menindaklanjuti hasil evaluasi oleh Tim Evaluator sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Evaluasi AKIP 2022 Nomor 700/110/TIM-VI/ITKOT, DP3AKB direkomendasikan untuk memperbaiki tujuan dan sasaran pada Renstra agar menggambarkan tugas pokok fungsi dan *core business* DP3AKB serta berorientasi *outcome*. Disamping itu, DP3AKB juga direkomendasikan untuk melakukan perubahan indikator kinerja utama sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sehingga dapat menetapkan target dan sasaran yang lebih menantang.

Adapun dasar pertimbangan perubahan tujuan dan sasaran strategis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan sebagai berikut:

- a. Tindak lanjut Rekomendasi Inspektorat dalam Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022;
- b. Arahan dan masukan dari Kegiatan penguatan AKIP oleh Kementerian PAN & RB RI kepada Pemerintah Daerah/ OPD Kota



Balikpapan tanggal 26 Juli 2023 – 28 Juli 2023 bertempat di Hotel Mercure Samarinda secara virtual;

- c. Hasil pembahasan perubahan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan dengan Inspektorat Kota Balikpapan.

Selain itu, perubahan IKU DP3AKB juga dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 yang merekomendasikan agar seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Balikpapan tidak lagi menggunakan indeks RB sebagai IKU dan menggunakan IKU yang selaras dengan kebijakan Permenpanrb Nomor 3 Tahun 2023.

Oleh karena itu, guna menindaklanjuti rekomendasi tersebut maka DP3AKB melakukan perubahan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala DP3AKB nomor 188.46-483/DP3AKB-SKT Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, kemudian ditindak lanjuti dengan perubahan IKU kembali berdasarkan rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP tahun 2023 Nomor 700/160/TIM-VI/ITKOT tanggal 29 Mei 2024. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kepala DP3AKB nomor 188.46-242/DP3AKB-SKT tanggal 2 Juli 2024 merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun



dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan.



**TABEL 2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BALIKPAPAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KET. /KRITERIA
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/CARA PENGUKURAN		
1	Meningkatnya pengaruh utamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	Indikator digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan Gender berdasarkan partisipasi Politik, pengambilan keputusan dan partisipasi ekonomi	1/3 (Ipar + IDM + linc-dist); Ipar = Indeks Keterwakilan di parlemen IDM = Indeks pengambilan keputusan Linc-dist = Indeks distribusi pendapatan	BPS	
2	Meningkatnya Kesertaan PUS ber-KB	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)*100	%	Penggunaan Indikator kinerja seperti itu adalah bahwa untuk mengukur sampai sejauh mana kesertaan PUS ber-KB meningkat adalah dengan alat ukur perhitungan prosentase pemakaian alat kontrasepsi oleh PUS (CPR)	Jumlah peserta KB Aktif dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100 peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan)	Dallap (Laporan Pengendalian Lapangan) yang dimiliki oleh DP3AKB	Cukup Jelas



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KET. /KRITERIA																																	
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/CARA PENGUKURAN																																			
3	Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang	Persentase Kelurahan Kategori Bekembang	%	Tingkat perkembangan kelurahan merupakan status tertentu dari capaian hasil dari kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah , serta pemerintah Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Katagori berkembang dibagi jumlah kelurahan dikali 100	Lampiran Permendagri 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa atau Kelurahan	Indikator data dan nilai perkembangan desa																																	
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DP3AKB	Nilai	Nilai Sakip adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diperoleh dari hasil evaluasi Tim Penilai Internal (Auditor Inspektorat).	Sesuai Permenpan RB No. 88 Tahun 2021, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="1249 868 1771 1134"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Komponen</th> <th colspan="3">Sub-Komponen</th> <th rowspan="2">Total Bo</th> </tr> <tr> <th>Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%</th> <th>Sub-Komponen 2 Kualitas 30%</th> <th>Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>3</td> <td>4,5</td> <td>7,5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td> <td>5</td> <td>7,5</td> <td>12,5</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Sub-Komponen			Total Bo	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100	Laporan Hasil Evaluasi AKIP	Cukup Jelas
Komponen	Sub-Komponen			Total Bo																																				
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%																																					
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30																																				
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																				
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																				
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25																																				
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																																				

Sumber : SK IKU Nomer 188.46-242/DP3AKB-SKT Tahun 2024



2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada sub bab ini disajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2023 serta menyebutkan tentang program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi adanya perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran serta adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan telah disusunnya Indikator Kinerja Utama Perubahan, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan secara simultan menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan.

Adapun perjanjian kinerja perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2024 sebagai berikut:



Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	70,5
2	Meningkatnya Kesertaan PUS ber-KB	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevelence Rate/mCPR)	%	70,65 %
3	Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang	Prosentase Kelurahan Kategori Berkembang	%	100%
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP DP3AKB	%	84,42

Sumber : PK DP3AKB tahun 2024

Pada Tahun 2024 melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. **37.405.493.910,-**. Melalui mekanisme perubahan APBD 2024 menjadi Rp. **38.462.234.005,-**. Adapun pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan pada tabel sebagaimana di bawah ini :

Tabel 2.6 Rencana Anggaran DP3AKB Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Th 2024	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	ANGGARAN(Rp)	KET
I	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender,Pemberdayaaan,Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,5%	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1,219,892,599	
A				Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	649,892,599	
1				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	254,562,599	
2				Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	395,330,000	
B				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	570,000,000	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Th 2024	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	ANGGARAN(Rp)	KET
3				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	370,000,000	
4				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	200,000,000	
II				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1,205,750,000	
C				Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	755,470,000	
5				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	755,470,000	
D				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	235,480,000	DAK
6				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	235,480,000	DAK
E				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	214,800,000	
7				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	214,800,000	
III				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1,288,700,000	
F				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,288,700,000	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Th 2024	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	ANGGARAN(Rp)	KET
8				Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1,288,700,000	
IV				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	348,300,000	
G				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	348,300,000	
9				Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	348,300,000	
V				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2,977,686,500	
H				Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	597,900,000	
10				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	597,900,000	
I				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2,379,786,500	
11				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,379,786,500	
VI				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1,929,960,000	
J				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	760,200,000	
12				Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	760,200,000	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Th 2024	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	ANGGARAN(Rp)	KET
K				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	840,000,000	
13				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	840,000,000	
L				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	329,760,000	
14				Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	329,760,000	APBD & DAK
VII	Meningkatnya Kesertaan PUS ber-KB	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	70,63	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1,156,900,000	
M				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	328,200,000	
15				Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	328,200,000	
N				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	828,700,000	
16				Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	800,000,000	
17				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	20,400,000	DAK
18				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	8,300,000	
VIII				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2,831,434,000	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Th 2024	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	ANGGARAN(Rp)	KET
0				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	651,100,000	
19				Pengendalian Program KKBPK	211,650,000	
20				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	22,100,000	
21				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	132,350,000	
22				Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	185,000,000	
23				Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100,000,000	DAK
P				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	471,230,000	
24				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	102,000,000	
25				Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	139,230,000	
26				Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	230,000,000	
Q				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1,324,154,000	
27				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	762,609,000	DAK
28				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	205,195,000	DAK



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Th 2024	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	ANGGARAN(Rp)	KET
29				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	356,350,000	
R				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	384,950,000	
30				Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	6,520,000	
31				Pembinaan Terpadu Kampung KB	120,000,000	
32				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	258,430,000	
IX				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4,982,210,000	
S				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3,709,610,000	
33				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	300,000,000	
34				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	2,435,500,000	
35				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	286,000,000	
36				Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	300,000,000	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Th 2024	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	ANGGARAN(Rp)	KET
37				Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	210,000,000	
38				Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	178,110,000	
T				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1,272,600,000	
39				Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	606,000,000	
40				Pendampingan keluarga berisiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon pus, ibu hamil, pasca/kelahiran, baduta/balita)	666,600,000	
X	Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang	Prosentase Kelurahan Kategori Berkembang	100%	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	686,990,000	
U				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	686,990,000	
41				Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	331,550,000	
42				Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	355,440,000	
XI				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	8,326,759,730	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Th 2024	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	ANGGARAN(Rp)	KET
V				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	8,326,759,730	
43				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	760,000,000	
44				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3,127,273,530	
45				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	710,000,000	
46				Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	333,585,000	
47				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3,395,901,200	
XII	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP DP3AKB	84,4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,507,651,176	
W				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,850,187,000	
48				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,850,187,000	
X				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,645,372,626	
49				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	623,428,200	
50				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	407,787,700	
51				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	108,083,600	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Th 2024	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	ANGGARAN(Rp)	KET
52				Penyediaan Bahan/Material	22,764,700	
53				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	483,308,426	
Y				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	784,384,000	
54				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	784,384,000	
Z				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	436,291,600	
55				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94,861,600	
56				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	341,430,000	
AA				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	791,415,950	
57				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	523,420,200	
58				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	167,652,000	
59				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,343,750	
JUMLAH					38,462,234,005	

Sumber: DPA DP3AKB kota Balikpapan tahun 2024



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

a. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja DP3AKB:

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana system ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Sesuai Laporan Hasil Evaluasi LKjIP Inspektorat Kota Balikpapan Nomor: 700/160//TIM-VI/ITKOT, tanggal 29 Mei 2024, bahwa hasil evaluasi/penilaian akuntabilitas kinerja DP3AKB tahun 2023 memperoleh nilai 64,64 atau predikat B (Baik) dengan rincian penilaian dalam table dibawah ini:

Tabel. 3.1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja tahun 2023 atas penilaian 2024:

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2023
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30%	21,05
2	Pengukuran Kinerja	30%	18,09
3	Pelaporan Kinerja	15%	9,83
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	15,67
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100%	64,64
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber: LHE SAKIP Inspektorat No.700/160/TIM-VI/ITKOT tahun 2024

Hasil Evaluasi Inspektorat terhadap Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dengan Nilai total 64,64 dengan predikat B (Baik). AKIP sudah cukup baik ,namun demikian



masih perlu banyak perbaikan khususnya akuntabilitas pada unit kerja. Terdapat peningkatan total nilai pada tahun 2022 sejumlah 52,98 dengan predikat **CC** menjadi 64,64 dengan predikat **B**.

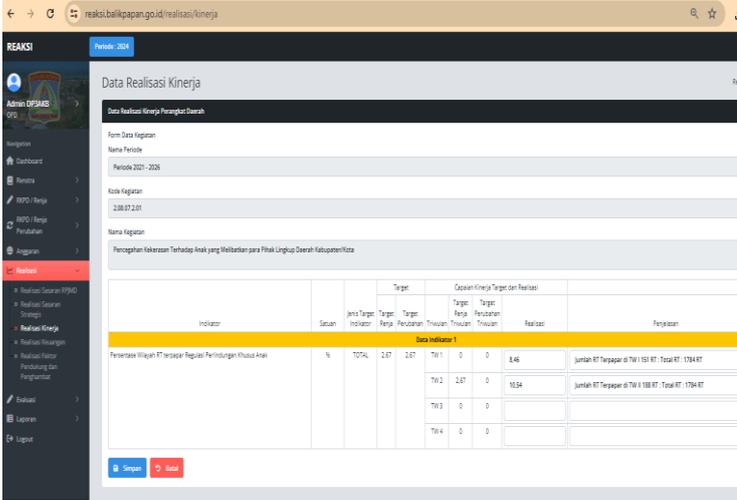
b. Tindak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP (Rekomendasi).

Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, berupaya selalu memperhatikan dan menindaklanjuti saran atau rekomendasi yang diberikan oleh tim Evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan melalui Laporan hasil evaluasi LKjIP 2023 Nomor 700/160//TIM-VI/ITKOT, tanggal 29 Mei 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja DP3AKB Tahun 2024

No	Rekomendasi/Saran	Tindak lanjut
1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja yang telah diperbaiki agar diformalkan dalam dokumen Renstra	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja yang telah diperbaiki akan diformalkan sesuai jadwal penyusunan yang diberlakukan, sudah berkoordinasi dengan stakeholder terkait namun belum dapat difasilitasi untuk formalisasi dalam Renstra, karena perlu proses yang panjang dan lama. IKU 2024 Perubahan telah di tetapkan sesuai SK Kepala DP3AKB 188.46-242/DP3AKB-SKT tanggal 2 Juli 2024.
2	Melakukan Pemantauan dan Pencapaian Target Perencanaan kinerja dengan baik	Dilaksanakan melalui koordinasi internal, pemantauan akan dilakukan oleh Kepala OPD, Sekretaris dan Kepala Bidang. Dilakuakn setiap per bulan untuk monev pelaksanaan kegiatan dan pertriwulan untuk monev kinerja (evaluasi Renja)
3	Menyusun definisi operasional yang jelas atas indikator kinerja ke 4 dalam IKU	Dilakukan perbaikan definisi operasional indikator kinerja ke 4 dalam IKU Perubahan.



No	Rekomendasi/Saran	Tindak lanjut																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">SASARAN STRATEGIS</th> <th rowspan="2">INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS</th> <th rowspan="2">SATUAN</th> <th colspan="2">PENJELASAN</th> <th rowspan="2">SUMBER DATA</th> <th rowspan="2">KETERANGAN</th> </tr> <tr> <th>DEFINISI OPERASIONAL</th> <th>FORMULASI/CARA PENGUKURAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang</td> <td>Persentase Kelurahan Kategori Berkembang</td> <td>%</td> <td>Tingkat perkembangan kelurahan merupakan status tertentu dari capaian hasil dari kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah Desa dan Kelurahan</td> <td>Jumlah Kelurahan Kategori berkembang dibagi jumlah kelurahan dikali 100</td> <td>Lampiran Permendagri 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa atau Kelurahan</td> <td>Indikator data dan nilai perkembangan desa</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</td> <td>Nilai SAKIP DP3AKB</td> <td>Nilai</td> <td>Nilai Sakip adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diperoleh dari hasil evaluasi Tim Penilai Internal (Auditor Inspektorat).</td> <td>Sesuai Permenpan RB No. 88 Tahun 2021, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut : </td> <td>Laporan Hasil Evaluasi AKIP</td> <td>Cukup Jelas</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Ditetapkan di : Balikpapan Pada tanggal : Juli 2024</p> <p style="text-align: right;">KEPALA DP3AKB  HERIA PRISNI</p>	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	3	Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang	Persentase Kelurahan Kategori Berkembang	%	Tingkat perkembangan kelurahan merupakan status tertentu dari capaian hasil dari kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Kategori berkembang dibagi jumlah kelurahan dikali 100	Lampiran Permendagri 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa atau Kelurahan	Indikator data dan nilai perkembangan desa	4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DP3AKB	Nilai	Nilai Sakip adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diperoleh dari hasil evaluasi Tim Penilai Internal (Auditor Inspektorat).	Sesuai Permenpan RB No. 88 Tahun 2021, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut : 	Laporan Hasil Evaluasi AKIP	Cukup Jelas
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS					SATUAN	PENJELASAN			SUMBER DATA	KETERANGAN																
			DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/CARA PENGUKURAN																								
3	Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang	Persentase Kelurahan Kategori Berkembang	%	Tingkat perkembangan kelurahan merupakan status tertentu dari capaian hasil dari kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Kategori berkembang dibagi jumlah kelurahan dikali 100	Lampiran Permendagri 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa atau Kelurahan	Indikator data dan nilai perkembangan desa																					
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DP3AKB	Nilai	Nilai Sakip adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diperoleh dari hasil evaluasi Tim Penilai Internal (Auditor Inspektorat).	Sesuai Permenpan RB No. 88 Tahun 2021, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut : 	Laporan Hasil Evaluasi AKIP	Cukup Jelas																					
4	Memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi REAKSI) agar lebih maksimal dalam melakukan pengisian data kinerja	Melakukan Penginputan kinerja per triwulan pada aplikasi reaksi 																										
5	Pengukuran Kinerja yang telah dilakukan secara berkala di lengkapi dengan rekomendasi dan tindaklanjutnya	Pengukuran Kinerja yang dilakukan secara berkala telah di lengkapi dengan rekomendasi dan tindaklanjutnya																										
6	Hasil Pengukuran capaian kinerja terkait reward and punishment agar dapat diidentifikasi tingkat reward and punishment-nya,	Telah dibuatkan Pedoman penilaian terkait reward and punishment																										



No	Rekomendasi/Saran	Tindak lanjut
	<p>antara lain pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja yang mencapai target dan tidak mencapai target, yang selesai tepat waktu dan yang tidak tepat waktu, capaian di atas standar dengan yang standar</p>	<p>PENERAPAN SISTEM REWARD DAN PUNISHMENT BAGI PNS DINAS PEMERINTAHAN PRIBUMIHAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCAN KOTA BALIKPAPAN</p> <p>Untuk mewujudkan tujuan pembangunan dititikatkan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kecakapan atau kompetensi sebagai salah satu aspek dan tidak mengabaikan hal lain sesuai dengan pandangan dari Undang-Undang (1973) yang mengatakan bahwa "Kelembagaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional berdasar kepentingan dari kepentingan aparatur negara dan perkembangan aparatur negara pada pelaksanaan pembangunan dari perkembangan pegawai negeri". Hal tersebut, sebagai tolak ukur dari pembangunan bangsa dipandang oleh perkembangan dari aparatur atau baik perkembangan atau, mental, maupun adalah Murni Mariani (1976), pegawai negeri yang sempurna adalah Pegawai Negeri yang penuh keistimewaan oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan serta norma pada, memiliki baik, terdapat tinggi, berprestasi, berdaya guna, berkeadilan tinggi dan tidak akan tanggung jawab sebagai insan pertama aparatur negara. Hal inilah yang menjadi alasan keadilan aparatur di Indonesia, dapat dikatakan bahwa kualitas Pegawai Negeri Sipil di Indonesia masih rendah. Menurut Sukirno (2004), terdapat sepuluh permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah terkait Sumber Daya Manusia (SDM). Sembeluh masalah yang diuraikan adalah: Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan dan bekerja di lingkungan instansi untuk bekerja bukan hanya untuk dan fungsinya sebagaimana tidak dititikkan Permasalahan tersebut antara lain: "banyaknya jumlah PNS dan tingkat pembendaharan yang tinggi dari tahun ke tahun, rendahnya kualitas dan kecukupan kompetensi yang dimiliki, ketidaksihan penempatan dan ketidakjelasan jalur karir yang dimiliki. Rendahnya profesionalisme pegawai, budaya kerja dan etos kerja, serta ketidakmampuan penguasaan kebidayaan profesional merupakan persoalan klasik yang dapat dititikkan dalam diri Pegawai Negeri Sipil di Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah guna meningkatkan kinerja dan produktivitas aparatur di Indonesia. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan memberlakukan sistem pemberian reward dan punishment.</p> <p>Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan, merupakan salah satu instansi pemerintah yang telah melaksanakan sistem pemberian reward dan punishment dalam rangka meningkatkan kebidayaan penguasanya.</p> <p>Sistem Reward dan Punishment</p> <p>1. Pengertian (Reward)</p> <p>Menurut Taha (2002), Penghargaan (reward) adalah ganjaran yang diberikan untuk memotivasi atau menghargai atau memberikan semangat. Ada berbagai jenis dan bentuk komponen penghargaan (reward) yang mungkin diberikan kepada pegawai berdasarkan prestasi kerja yang telah terdapat di dalam:</p>
7	<p>Meningkatkan Koordinasi dengan BPS sebagai sumber data pengukuran</p>	<p>Berkoordinasi dengan BPS dalam Penyusunan buku IPG Kota Balikpapan Tahun 2024</p> 
8	<p>Laporan Kinerja yang disusun agar dipublikasikan secara luas (dapat diakses masyarakat umum)</p>	<p>Laporan Kinerja publikasi secara luas melalui website DP3AKB</p> 



No	Rekomendasi/Saran	Tindak lanjut

Sumber: Data diolah DP3AKB tahun 2024

Adapun tindak lanjut hasil Evaluasi Inspektorat terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP (Rekomendasi) yang telah dilakukan meliputi :

- Melakukan rapat pembahasan untuk memperbaiki Tujuan dan Sasaran Renstra mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2021-2026
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah menyusun perubahan Perjanjian Kinerja berhubung terdapat perubahan strategi yang memengaruhi tujuan dan sasaran, Sejalan dengan hal tersebut maka sasaran strategis pada DP3AKB juga mengalami perubahan dan secara simultan perjanjian kinerja dan IKU DP3AKB juga mengalami perubahan.

Dasar Pertimbangan Perubahan Tujuan dan Sasaran Strategis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan :

- a. Tindak lanjut Rekomendasi Inspektorat dalam Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022
- b. Arahan dan masukan dari Kegiatan penguatan AKIP oleh Kementerian PAN & RB RI kepada Pemerintah Daerah/OPD



Kota Balikpapan tanggal 26 Juli 2023 – 28 Juli 2023 bertempat di Hotel Mercure Samarinda secara virtual.

- c. Hasil Pembahasan Perubahan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan oleh Inspektorat, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Adapun item-item yang dilakukan perbaikan adalah sebagai berikut:

- a. Memperbaiki Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan beserta indikatornya yaitu:

SEMULA	MENJADI
<p>TUJUAN: Meningkatnya Anggaran yang Responsif Gender</p> <p>INDIKATOR: Persentase Anggaran yang responsif Gender</p>	<p>TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pengarustamaan Gender berbasis</p> <p>INDIKATOR Indeks Pembangunan Gender (IPG)</p>

- b. Memperbaiki 2 (dua) item Sasaran Strategis beserta Indikatornya yaitu:

No	SEMULA	MENJADI
1	<p>SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Jumlah RKA Perangkat Daerah yang disusun melalui mekanisme Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)</p> <p>INDIKATOR: Persentase RKA Responsif Gender</p>	<p>SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak</p> <p>INDIKATOR: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</p>
2	<p>SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah DP3AKB</p> <p>INDIKATOR: Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah DP3AKB</p>	<p>SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>INDIKATOR: Nilai SAKIP DP3AKB</p>



- c. Melakukan perbaikan formulasi indikator dengan menganalisa masalah yang dihadapi dan memberikan solusi perbaikan melalui rapat koordinasi Kepala Dinas dengan Sekretaris, Kepala Bidang dan Ketua Tim.
- d. Menetapkan ulang target sasaran yang lebih menantang dengan melihat hasil evaluasi capaian target kinerja tahun berjalan.
- e. Menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 sesuai Surat Sekretarsi Daerah Nomor 060.4/01799/org tanggal 22 Desember 2023 perihal Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023.
Perjanjian Kinerja perlu dilakukan perubahan berhubung terdapat perubahan strategi yang mempengaruhi tujuan dan sasaran. Juga terdapat perubahan prioritas serta asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
- f. Berkoordinasi dengan Tim Evaluator SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan terkait rekomendasi perubahan IKU sejalan dengan perubahan tujuan dan sasaran strategis DP3AKB.
- g. Menetapkan perubahan IKU dengan perubahan sasaran strategis melalui penetapan **SK Kepala DP3AKB Nomor 188.46-483/DP3AKB-Skt** tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) perubahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- h. Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana



Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan.

- i. Pengumpulan data kinerja DP3AKB dilaksanakan seluruh bidang setiap bulan melalui link.bit.ly dan sudah tertuang dalam SOP tentang Mekanisme pengumpulan data Kinerja. Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja yang sudah diinput pada link <https://bit.ly/evaluasiarenjadp3akb2024> dikumpulkan dan dirangkum oleh bagian program untuk diinput kembali pada aplikasi Reaksi milik Pemerintah Kota Balikpapan yang beralamat pada <https://reaksi.balikpapan.go.id>. Dengan adanya aplikasi milik Pemkot Balikpapan maka DP3AKB tidak lagi membuat sistem aplikasi pengumpulan data kinerja
- j. Membuat pohon kinerja dan memanfaatkan dalam perencanaan kinerja instansi dan atas *crosscutting* yang ada melibatkan instansi pengampu dalam perencanaan kinerja.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan terkait penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi, sebagai berikut:

Tabel 3.3. Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
1	< 100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target.
2	= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan.
3	> 100%	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi.

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan, 2025



Selanjutnya, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2024 yang dituangkan dalam Laporan kinerja tahunan ini merupakan hasil kinerja berdasarkan indikator dan target dari sasaran yang telah diperjanjikan kinerjanya. Adapun pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Predikat	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	nilai	70,5	72,00*	102,13	Melebihi Target	Penyesuaian indikator dan target pada IKU
2	Meningkatnya Kesertaan PUS ber-KB	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	persen	70,65	64,45	91,22	Tidak Tercapai	Secara target Kota Balikpapan masih belum bisa mencapai, namun realisasi yang ada sudah merupakan 1 dari 10 Kab/Kota yang realisasinya diatas realisasi Propinsi Kalimantan Timur bahkan diatas realisasi nasional
3	Meningkatnya Kelurahan Kategori berkembang	Prosentase kelurahan kategori berkembang	persen	100	100	100	Tercapai/ Sesuai Target	Semakin intensnya sosialisasi dan pembinaan tentang administrasi dan pelaporan kepada kelurahan-kelurahan
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DP3AKB	Nilai	84,42	64,64	76,57	Tidak Tercapai	Perlu perbaikan dalam menentukan indikator tujuan dan sasaran strategis yang SMART

Catatan :

*data realisasi tahun 2023 sumber data dari BPS tahun 2024 belum rilis

Sumber: Data DP3AKB yang diolah



Gambar 1.5.
Capaian Kinerja DP3AKB Tahun 2024
Sumber: Form E.81 Evaluasi Renja REAKSI

Berdasarkan tabel 3.4 dan Gambar 1.5 di atas bahwa capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar **92,48 %** pada tahun 2024 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **tidak mencapai target**. Pada sasaran strategis 1 capaian kinerja **melebihi target (warna biru)** dan sasaran strategis 3 capaian kinerja adalah **tercapai/sesuai target (warna hijau)**, sasaran strategis 2 dan ke 4 capaian kinerja **tidak tercapai (warna kuning)**. Realisasi kinerja pada sasaran satu (1) di tahun 2024 belum dapat diketahui nilainya, karena sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) belum di rilis sehingga capaian kinerja diperoleh dari data tahun 2023.

Dengan demikian maka secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan keluarga Berencana telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan



Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
Tahun 2021-2026.

3.2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Pada sub bab ini memuat pengukuran realisasi dan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Adapun pengukuran realisasi dan capaian kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat terlihat sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.5 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023		2024	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	68.62	N/A	69.27	N/A	72	104%	72	102%
Meningkatnya Kesertaan PUS ber- KB	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	70.3	70%	52.81	75%	61.02	86%	64.45	91%
Meningkatnya Keluruhan Kategori berkembang	Prosentase keluruhan kategori berkembang	%	N/A	N/A	38.24	650%	100	100%	100	100%
Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DP3AKB	Nilai	84.33	100%	83.64	99%	52.98	63%	64.64	77%

Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan

Berdasarkan data tabel 3.5 dapat diketahui bahwa tahun ini adalah tahun ketiga realisasi kinerja dari indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026,

Dari empat sasaran strategis yang ada, realisasi kinerja pada sasaran 1 di tahun 2024 belum dapat diketahui nilainya, karena sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) belum di rilis. Sedangkan realisasi tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun 2023 tidak terdapat kenaikan ataupun penurunan.

Pada sasaran 2 realisasi kinerja tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 terdapat peningkatan persentase capaian sejumlah 5%. Pada sasaran 3 tidak terjadi peningkatan yang signifikan artinya memang stag setiap tahun dan terealisasi 100 %.



Sedangkan realisasi kinerja sasaran 4 mengalami peningkatan sejumlah 14% pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Adapun penjelasan dari masing-masing realisasi kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak

Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) kota Balikpapan tahun 2024 tidak mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya,

Sasaran 2 : Meningkatnya Kesertaan PUS ber- KB

Indikator : Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevelence Rate/mCPR).
Persentase pemakaian alat kontrasepsi modern (MCPR) tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 3,43 % dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya akan tetapi mengalami penurunan sebesar 5,85% bila dibanding awal perencanaan tahun 2021. Data yang disampaikan adalah data yang diinput pada aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) melalui laporan faskes.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kelurahan Kategori berkembang.

Indikator : Prosentase kelurahan kategori berkembang.
Tidak adanya peningkatan atau stagnasi realisasi , kondisi ini dikarenakan realisasi sama dengan tahun sebelumnya yaitu sudah 100 % kelurahan berkembang dan indikator kinerja ini merupakan tahun ketiga urusan yang diampu DP3AKB sesuai Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada per 1 Januari



2022 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kelurahan) dilimpahkan ke DP3AKB. Terdapat penetapan target yang sudah disesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya karena dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait sasaran ke 3 mampu mencapai realisasi 100% kelurahan kategori berkembang pada tahun lalu.

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

Indikator : Nilai SAKIP DP3AKB

Realisasi nilai SAKIP DP3AKB tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 14%, dimana total nilai 64,64 dengan predikat B/Baik yang semula nilainya 52,98 pada tahun sebelumnya.

3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Capaian kinerja sasaran dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah Renstra 2021-2026 DP3AKB dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.6 Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2024			Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6/8*100
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	70.5	72	102%	-	-
2	Meningkatnya Kesertaan PUS ber- KB	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive	%	70.65	64.45	91%	70.65	91%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2024			Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
		Prevelence Rate/ mCPR)						
3	Meningkatnya Kelurahan Kategori berkembang	Prosentase kelurahan kategori berkembang	%	100	100	100%	100	100%
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DP3AKB	Nilai	84.42	64.64	77%	84.49	77%

Sumber data : laporan evaluasi Renja DP3AKB 2024

Berdasarkan Tabel 3.6 dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun ketiga Rencana Strategis DP3AKB dari empat indikator kinerja, yang telah memenuhi target jangka menengah Renstra adalah satu indikator kinerja yaitu Persentase Kelurahan Kategori berkembang dengan tingkat kemajuan 100 %, sedangkan indikator kinerja lainnya yaitu Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (*Modern Contraceptive Prevelence Rate/ mCPR*) baru mencapai 91% tingkat kemajuannya pada target jangka menengah Renstra. Untuk indikator Nilai SAKIP DP3AKB tingkat kemajuan sebesar 77%.

Terdapat sasaran strategis dan indikator kinerja yang sebelumnya tidak terdapat dalam Renstra perangkat daerah sehingga tidak dapat dibandingkan (sasaran strategis dan indikator kinerja merupakan perbaikan hasil evaluasi internal) yaitu Sasaran strategis meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak dengan indikator Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) belum bisa dilihat tingkat kemajuannya. Hal ini disebabkan DP3AKB melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berhubung terdapat perubahan strategi yang memengaruhi tujuan dan sasaran sebagai tindak lanjut rekomendasi dari tim Evaluator SAKIP. Sejalan dengan hal tersebut maka sasaran strategis pada DP3AKB



juga mengalami perubahan dan secara simultan IKU DP3KB juga mengalami perubahan.

3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (Brenchmark Kinerja)

Adapun perbandingan realisasi kinerja DP3AKB tahun ini jika dibandingkan dengan realisasi Pemerintah Provinsi dan standar nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Realisasi Kinerja yang mengacu pada Standar Nasional dan dibandingkan dengan realisasi pemerintah provinsi Kalimantan Timur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Nasional	Realiasi Provinsi Kaltim
1	2	3	4	5	6	7 = 5/6*100
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaaan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG)	persen	72,0	76,9	68,96
2	Meningkatnya Kesertaan PUS ber- KB	Pemakaian Alat Kontrasepsi (<i>Modern Contraceptive Prevelence Rate/ mCPR</i>)	persen	64,45	60,4	62,46
3	Meningkatnya Kelurahan Kategori berkembang	Prosentase Kelurahan Kategori Berkembang	persen	100	-	-
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DP3AKB	Nilai	64,64	-	-

Sumber data: BPS RI, LPPD dan LKPJ KALTIM, 2023

Berdasarkan tabel 3.7 diatas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja DP3AKB ada sebagian yang tidak dapat disandingkan dengan standar nasional/ lainnya, karena DP3AKB merupakan perangkat



daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya. Untuk **Sasaran 1** capaian DP3AKB sebesar 72 %, dimana realisasi nasional untuk IDG sebesar 76,9% dan realisasi Provinsi Kaltim sebesar 68,96 %. IDG Kota Balikpapan masih dibawah realisasi nasional namun sudah melampaui realisasi Provinsi Kaltim.

Kinerja DP3AKB lain yang dapat disandingkan dengan standar nasional adalah indikator **sasaran 2**, capaian realisasi tahun 2024 adalah 64,45 % sedangkan realisasi nasional sejumlah 60,4% dan realisasi provinsi Kaltim sebesar 62,46 %. Realisasi ini meskipun tidak mencapai target Renstra namun sudah berhasil melampaui realisasi provinsi Kaltim bahkan realisasi nasional. Data mengenai angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) maupun nasional pada tahun 2024 belum tersedia, sehingga saat ini masih digunakan data tahun 2023.

Sementara untuk sasaran indikator kinerja lainnya berdasarkan pada indikator kinerja OPD yang disusun berdasarkan penilaian mandiri OPD DP3AKB. **Sasaran III** sudah mencapai 100 % kelurahan berkembang. Di tingkat provinsi maupun nasional tidak ada angka pembandingnya. Demikian juga untuk **Sasaran IV**, DP3AKB belum bisa membandingkan dengan realisasi provinsi maupun nasional.

3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi dalam rangka pencapain sasaran disajikan dalam tabel dibawah ini:



Tabel 3.8 Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Predikat		
				Tidak Tercapai (<100%)	Tercapai / Sesuai Target (= 100%)	Melebihi Target (>100%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG)	102%			v
2	Meningkatnya Kesertaan PUS ber- KB	Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevelence Rate/ mCPR)	91%	v		
3	Meningkatnya Kelurahan Kategori berkembang	Prosentase Kelurahan Kategori Berkembang	100%		v	
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DP3AKBPM	77%	v		

Sumber data: laporan evaluasi Renja DP3AKB 2024

Pengukuran pencapaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2024 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.



Tabel 3.9 Analisis Capaian dan Solusi Perbaikan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	Tercapai /Tidak Tercapai	Penyebab	Solusi Perbaikan atau Peningkatan
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG)	persen	102%	Melebihi Target (>100%)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya dukungan regulasi dari pemerintah Kota, dimana kota Balikpapan sudah memiliki Peraturan Walikota nomor 27 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan ➤ Pelaksanaan penguatan SDM perencana bagi OPD melalui kegiatan pelaksanaan PPRG ➤ Koordinasi dan konsolidasi yang baik dengan stakeholder terkait dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di instansi masing-masing ➤ Sosialisasi guna peningkatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelatihan penyusunan ARG kepada seluruh OPD 2. Meningkatkan pemahaman Lembaga dalam mengkatagorikan anggaran responsive gender dengan melakukan bimtek terhadap Lembaga dalam penyusunan perencanaan anggaran responsif gender 3. Optimalisasi Keterlibatan peran OPD, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Organisasi Kemasyarakatan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak; 4. Meningkatkan fungsi koordinasi lintas sektoral dalam pelaksanaan peningkatan kesadaran perempuan untuk terlibat dalam kegiatan publik (ekonomi dan politik), serta melibatkan institusi pendidikan sehingga mengarah pada pembentukan paradigma adanya kesetaraan dalam tanggungjawab dan pemanfaatan waktu antara laki-



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	Tercapai /Tidak Tercapai	Penyebab	Solusi Perbaikan atau Peningkatan
						peran aktif perempuan dalam berbagai sektor pembangunan di Kota Balikpapan ➤ Penanganan intensif pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	laki dan perempuan
2	Meningkatnya Kesertaan PUS ber- KB	Pemakaian Alat Kontrasepsi (<i>Modern Contraceptive Prevelence Rate/ mCPR</i>)	persen	91%	Tidak Tercapai	➤ Belum mencapai target karena masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya ber-KB, menganut paham tertentu, memiliki penyakit tertentu serta khawatir untuk menggunakan alat kontrasepsi. ➤ Cakupan data dari beberapa fasilitas kesehatan yang kurang akurat (tidak dilaporkan). Ada beberapa fasilitas Kesehatan yang melakukan pemasangan KB mandiri tapi tidak dilaporkan ke dinas terkait. ➤ Belum maksimalnya KIE tentang 8 Fungsi Keluarga.	1. Peningkatan akses layanan kontrasepsi, termasuk jaminan ketersediaan alat kontrasepsi dan perluasan akses/jangkauan pelayanan KB (melalui penggerakan Penyuluh Keluarga Berencana/PKB 2. Peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang kontrasepsi modern 3. KIE peningkatan kesadaran generasi muda terkait kesehatan reproduksi bagi pasangan usia muda/ pasangan millennial.
3	Meningkatnya Kelurahan Kategori berkembang	Prosentase Kelurahan Kategori Berkembang	persen	100%	Tercapai / Sesuai Target	hasil dari upaya berkelanjutan dalam pembinaan dan pendampingan kelurahan,	Koordinasi dan Konsolidasi ke Kecamatan untuk melakukan monitoring monitoring Kelurahan agar



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	Tercapai /Tidak Tercapai	Penyebab	Solusi Perbaikan atau Peningkatan
						serta komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pemerintahan di tingkat kelurahan. Adanya dukungan dari Kecamatan untuk mensupport seluruh kelurahan dalam melakukan update data melalui aplikasi Epdeskel	rutin mengupdate data Prodeskel dan Epdeskel
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DP3AKB	Nilai	77%	Tidak Tercapai	Tujuan dan sasaran pada dokumen Renstra tidak menggambarkan tupoksi dan <i>core bussines</i> serta tidak berorientasi outcome. Terhadap penetapan target sasaran juga kurang <i>challenging</i> . Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Renstra dinilai oleh evaluator masih kurang tepat	Memperbaiki tujuan dan sasaran dan memformulasikan indikatornya. Terdapat target dan sasaran yang dirubah lebih menantang sekaligus menyelaraskan Perjanjian Kinerja dengan dokumen perencanaan lainnya dan menyusun perubahan Indikator Kinerja Utama

Sumber: Evaluasi Renja DP3AKB Kota Balikpapan, 2024

Adapun analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis 1: Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak.

Dari tabel 3.8 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran 1 dengan indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan predikat **melebihi**



target yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 102 % dengan realisasi kinerja 72,00% dari target 70,5 %.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator untuk mengukur tingkat partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Ukuran dari partisipasi tersebut diinterpretasikan dengan persentase perempuan dalam parlemen, persentase perempuan dalam tenaga profesional dan presentase kontribusi pendapatan perempuan. IDG Kota Balikpapan tahun 2024 sebesar senilai 72,00 masih lebih tinggi dibanding nilai Provinsi Kalimantan Timur 68,96 tetapi masih dibawah nilai nasional.

Target pencapaian IDG Kota Balikpapan tahun 2024 ditetapkan sebesar 70,5%, dan berhasil mencapai realisasi sebesar 72%, dengan tingkat capaian kinerja 102 %. Pencapaian yang melebihi target ini menunjukkan keberhasilan program-program pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender di Kota Balikpapan. IDG mengukur tingkat partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Capaian ini mencerminkan meningkatnya peran aktif perempuan dalam berbagai sektor pembangunan di Kota Balikpapan.

Sedangkan realisasi tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun 2023 tidak terdapat kenaikan ataupun penurunan karena hasil penghitungan tahun 2024 dari BPS belum dirilis.

Sasaran strategis 1 adalah sasaran yang mengalami perubahan yang tertuang pada penetapan Perubahan Perjanjian Kinerja dan penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai rekomendasi dari Tim Evaluator SAKIP Inspektorat untuk memperbaiki tujuan dan Sasaran agar menggambarkan tugas pokok fungsi DP3AKB dan *core business* serta berorientasi outcome.

Beberapa hal yang menjadi penyebab **keberhasilan** capaian indikator kinerja antara lain:

- a. Adanya dukungan regulasi dari pemerintah Kota, dimana kota Balikpapan sudah memiliki Peraturan Walikota nomor 27 tahun



2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan.

Implementasi dukungan regulasi dari pemerintah kota ini, dimana setiap OPD dalam penyusunan RKA harus menyertakan Analisis gender dalam bentuk GAP, GBS dan TOR. Diharapkan dengan Perangkat Daerah menerapkan strategi Pengarusutamaan Gender maka pelaksanaan Anggaran yang Responsif Gender bisa menghapus hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender dan mengungkit nilai Indeks Pemberdayaan (IDG) di kota Balikpapan.



Gambar 1.5.
Perwali No 27 Tahun 2019
Sumber : JDIH Kota Balikpapan



- b. Pelaksanaan penguatan SDM perencana bagi OPD melalui kegiatan pelaksanaan PPRG;



Gambar 1.6.
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Sumber: Dokumentasi DP3AKB 2024

Pada kegiatan ini dilakukan pelatihan dan bimbingan bagi para perencana di tiap-tiap OPD dalam Penyusunan Perencanaan Responsif Gender (PPRG) berupa pembuatan GAB, GBS dan TOR masing-masing sub kegiatan.

- c. Koordinasi dan konsolidasi yang baik dengan stakeholder terkait dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di instansi masing-masing.
- d. Peningkatan peran aktif perempuan dalam berbagai sektor pembangunan di Kota Balikpapan

Untuk mempertahankan capaian yang sudah memenuhi target diperlukan upaya/rencana kedepannya agar capaian yang sudah terpenuhi ditahun-tahun mendatang dapat tetap dipertahankan.

Beberapa upaya/rencana kedepan untuk mempertahankan pencapaian sasaran strategis 1 diantaranya:



- ✓ Mengusulkan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam bentuk Perda.
- ✓ Penguatan peran Tim Driver (Penggerak PUG) dalam mensosialisasikan PPRG agar Perangkat Daerah memahami pentingnya penyusunan PPRG.
- ✓ peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan PPRG melalui pendampingan langsung ke OPD.
- ✓ Meningkatkan kualitas SDM pengelola data gender;
- ✓ Meningkatkan peran koordinasi lintas OPD dalam pengarusutamaan gender;
- ✓ Optimalisasi peran OPD, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Organisasi Kemasyarakatan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak;
- ✓ Penguatan dan pengembangan layanan konseling keluarga dan anak;
- ✓ Penguatan kelembagaan yang menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai ketentuan;
- ✓ Meningkatkan fungsi koordinasi lintas sektoral dalam pelaksanaan peningkatan kesadaran perempuan untuk terlibat dalam kegiatan publik (ekonomi dan politik), serta melibatkan institusi pendidikan sehingga mengarah pada pembentukan paradigma adanya kesetaraan dalam tanggungjawab dan pemanfaatan waktu antara laki-laki dan perempuan.
- ✓ sosialisasi pola pengasuhan anak secara bersama antara laki-laki dan perempuan.

2) Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kesertaan PUS ber- KB;

Dari tabel 3.8 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran 2 dengan indikator kinerja Pemakaian Alat Kontrasepsi (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR*) menunjukkan kriteria penilaian **tidak tercapai** yaitu mempunyai nilai



capaian kinerja 91% dengan realisasi kinerja 64,45% dari target 70.65%.

Beberapa hal yang menjadi penyebab **ketidak berhasilan** capaian indikator kinerja antara lain:

- a. Belum mencapai target karena masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya ber-KB, menganut paham tertentu, memiliki penyakit tertentu serta khawatir untuk menggunakan alat kontrasepsi.
- b. Cakupan data dari beberapa fasilitas kesehatan yang kurang akurat (tidak dilaporkan). Ada beberapa fasilitas Kesehatan yang melakukan pemasangan KB mandiri tapi tidak dilaporkan ke dinas terkait.
- c. Belum maksimalnya KIE tentang 8 Fungsi Keluarga.

Beberapa solusi/upaya telah yang dilakukan oleh DP3AKB untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis dimaksud adalah sebagai berikut:

- ✓ peningkatan akses layanan kontrasepsi, termasuk jaminan ketersediaan alat kontrasepsi dan perluasan akses/jangkauan pelayanan KB (melalui penggerakan Penyuluh Keluarga Berencana/PKB),
- ✓ peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang kontrasepsi modern.
- ✓ Meningkatkan kerjasama dengan KUA se-kota Balikpapan dalam penyuluhan kepada Calon Pengantin (CATIN).
- ✓ Meningkatkan kualitas layanan KB;
- ✓ KIE peningkatan kesadaran generasi muda terkait kesehatan reproduksi bagi pasangan usia muda/ pasangan millennial.
- ✓ Sosialisasi Informasi Program Bangga Kencana dikemas secara menarik mengikuti era digitalisasi saat ini.
- ✓ Pembinaan secara kontinyu kepada pengelola Klinik KB di Faskes terkait dengan pola mekanisme pencatatan dan



pelaporan dalam pelayanan KB sesuai dengan ketentuan BKKBN Pusat

- ✓ optimalisasi partisipasi dalam kegiatan POKTAN dan Bangsa Kencana
- ✓ Meningkatkan edukasi Kesehatan Reproduksi (Kespro) kepada remaja melalui PIK-R, Forum Generasi Berencana (Genre) dan BKR.
- ✓ Meningkatkan Kerjasama dengan KUA dalam kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).

3) Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kelurahan Kategori berkembang;

Dari tabel 3.8 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran 3 (tiga) dengan indikator kinerja Prosentase Kelurahan Kategori Berkembang menunjukkan predikat **Tercapai/Seusai Target** yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 100 % dengan realisasi kinerja 100% dari target 100%. Pencapaian ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dalam pembinaan dan pendampingan kelurahan, serta komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pemerintahan di tingkat kelurahan.

Capaian 100% ini juga mengindikasikan keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan, meskipun masih perlu upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan status ini ke tingkat yang lebih tinggi.

Beberapa hal yang menjadi penyebab **keberhasilan** capaian indikator kinerja antara lain:

- a. Adanya surat dari Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor 100.3.3.9/1479/BPD tanggal 01 April 2024 tentang Perpanjangan Waktu Pengisian Aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel). Kondisi ini memacu kelurahan untuk melengkapi data-data dimaksud, atas dasar tersebut update data melalui



aplikasi Epdeskel untuk mengetahui tingkatan kriteria kelurahan yang ada di Balikpapan tersaji secara lengkap.



Gambar 1.7.

Screenshot Aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel)

Sumber: Kementerian Dalam Negeri

- b. Adanya dukungan dari Kecamatan untuk mensupport seluruh kelurahan dalam melakukan update data melalui aplikasi Epdeskel.



Gambar 1.8. Screenshot Aplikasi Epdeskel

Sumber: Kementerian Dalam Negeri

Beberapa upaya/rencana kedepan untuk mempertahankan pencapaian sasaran strategis 3 diantaranya:

- ✓ Koordinasi dan Konsolidasi ke Kecamatan untuk melakukan monitoring Kelurahan agar rutin mengupdate data Prodeskel dan Epdeskel untuk persiapan lomba Kelurahan yang diadakan setiap tahun, sehingga capaian pada tahun berikutnya tetap dipertahankan.



- ✓ Penyesuaian target renstra untuk tahun mendatang indikator kinerja sasaran strategis 3 capaiannya dapat dipertahankan pada tahun berikutnya.

4) Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari tabel 3.8 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran 4 (empat) dengan indikator kinerja Nilai SAKIP DP3AKB menunjukkan predikat **Tidak Tercapai** yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 77 % dengan realisasi kinerja 64,64 dari target 84,42. Beberapa hal yang menjadi penyebab **ketidak berhasilan** capaian indikator kinerja tertuang dalam Hasil Evaluasi Akip tahun 2023 oleh Tim Evaluator SAKIP Inspektorat. Tujuan dan sasaran pada dokumen Renstra oleh tim evaluator dianggap tidak menggambarkan tupoksi dan *core bussines* serta tidak berorientasi outcome. Terhadap penetapan target sasaran juga kurang *challenging*. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Renstra dinilai oleh evaluator masih kurang tepat. Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan mendasar dalam aspek perencanaan strategis DP3AKB, terutama dalam perumusan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang lebih tepat dan terukur. Meskipun terdapat kendala dalam mekanisme perubahan dokumen, hal ini dapat menjadi pembelajaran untuk penyusunan dokumen perencanaan periode berikutnya.

Beberapa upaya/rencana kedepan untuk mempertahankan pencapaian sasaran strategis 4 diantaranya yaitu memperbaiki tujuan dan sasaran dan memformulasikan indikatornya. Terdapat target dan sasaran yang dirubah lebih menantang sekaligus menyelaraskan Perjanjian Kinerja dengan dokumen perencanaan lainnya dan menyusun perubahan Indikator Kinerja Utama.



3.2.6 Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja (Perjanjian Kinerja)

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:



Tabel 3.10 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG)	102,13%	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase jumlah OPD yang telah melakukan penyusunan anggaran yang Responsif Gender	93,76%
				Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Regulasi yang Mendukung Pelaksanaan PPRG	100 %
				Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Industri Rumahan yang Dibina	100,00%
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO per 100.000 Penduduk Perempuan	-350,24%
				Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Cakupan RT Terpapar Regulasi Perlindungan Perempuan	100%
				Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Korban Kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan layanan komperhensif	118,69%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
				Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Pelatihan	100,00%
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga	100,00%
				Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase keluarga yang mendapatkan pelayanan PUSPAGA	160%
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentase OPD yang Memiliki Data Terpilah	105,23%
				Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Terlatih Penyediaan Data Terpilah	100,00%
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA	100%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
				Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan sebagai Tindak Lanjut dari Hasil Evaluasi KLA oleh Kementerian yang Disusun	100,00%
				Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Dibina	100,00%
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Presentase Penyelesaian Penanganan klien pada UPTD PPA	106,67%
				Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Wilayah RT terpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak	172.73%
				Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-472,7%
				Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Terbina	100,00%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
2	Meningkatnya Kesertaan PUS ber- KB	Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevelence Rate/ mCPR	91,22 %	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Prosentase tindak lanjut rekomendasi kebijakan terkait pengendalian penduduk	121,21%
				Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan Jalur Formal Terbentuk dijenjang SD/MI dan SLTP/MTS	96,02%
				Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan rekomendasi kebijakan terkait pengendalian penduduk	100,00%
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	108.4%
				Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah PUS Peserta KB Aktif	92.45%
				Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kelompok IMP terbina oleh PKB	100,00%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
				Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepesertaan KB MKJP	109.09%
				Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah intervensi pada Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas)	100,00%
3	Meningkatnya Kelurahan Kategori berkembang	Prosentase Kelurahan Kategori Berkembang	100 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Kegiatan/Poktan	50.63%
				Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok BKB Terbentuk	88.89%
				Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Keluarga Berisiko Stunting yang mendapatkan Pendampingan dan Pemantauan	114.29%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai Dengan Regulasi	100,00%
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Sesuai Dengan Regulasi	100,00%
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Nilai swadaya masyarakat dalam pembangunan di kelurahan	99.28%
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Diberdayakan	100.54%
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DP3AKB	76,57 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	97.59%
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96.39%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.39%
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96.39%
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.39%
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.39%

Sumber : Form E.81 aplikasi REAKSI Bappeda Kota Balikpapan



Berdasarkan tabel di atas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

Merujuk tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa program yang menunjang keberhasilan dari pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah tertulis dalam perjanjian kinerja sebagaimana berikut ini:

1) Indikator dengan klasifikasi tercapai, dan sangat tercapai

Indikator-indikator dengan klasifikasi ini dapat dipertahankan program program kerja yang telah dilakukan. Berikut merupakan rincian program yang perlu dipertahankan:

a. Indikator Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG)

- Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- Program Perlindungan Khusus Anak

b. Indikator Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)

- Program Pengendalian Penduduk
- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

c. Indikator Prosentase Kelurahan Kategori Berkembang

- Program Administrasi Pemerintahan Desa

2) Indikator dengan klasifikasi cukup tercapai dan tidak tercapai

Indikator-indikator dengan klasifikasi cukup tercapai dapat ditingkatkan kinerja programnya dan indikator dengan klasifikasi tidak tercapai dapat dilakukan evaluasi program kerja. Berikut merupakan program-program yang perlu ditingkatkan dan dilakukan evaluasi:

a. Indikator Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG)

- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- Program Perlindungan Perempuan

b. Indikator Prosentase Kelurahan Kategori Berkembang:



- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- c. Indikator Nilai SAKIP DP3AKB:
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun analisis untuk tiap sasaran strategis berdasarkan program yang telah dilakukan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran Strategis 1:** Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, dengan indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mempunyai capaian kinerja sebesar 102,13 %. Indikator digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan Gender berdasarkan partisipasi Politik, pengambilan keputusan dan partisipasi ekonomi. Nilai IDG ini merupakan ukuran tingkat partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Ukuran dari partisipasi tersebut diinterpretasikan dengan presentasi keterwakilan perempuan di parlemen, persentase perempuan dalam tenaga professional sebagai pengambil keputusan dan persentase kontribusi pendapatan. Indikator ini dapat terlaksana melalui program yang berdampak / memicu capaian kinerja masing-masing sasaran yaitu:

1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan Tingkat capaian 93,76%

Program PUG dilaksanakan melalui kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan capaian 100. Pemerintah Kota Balikpapan telah memiliki beberapa regulasi



terkait PUG yang tertuang dalam Peraturan Walikota nomor 27 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender. Juga Surat Keputusan Walikota yang mengatur tentang Kelompok Kerja PUG serta Tim Penggerak / *driver* dan tim Teknis PUG kota Balikpapan. Sejumlah 34 Perangkat Daerah juga telah memiliki Surat Keputusan tentang *Focal Point* Pengarustamaan Gender pada masing-masing perangkat daerah. Dengan adanya dukungan regulasi dari pemerintah kota, dimana setiap OPD dalam penyusunan RKA harus disertakan Analisis gender dalam bentuk GAP, GBS dan TOR; penguatan SDM perencana bagi OPD melalui kegiatan pelaksanaan PPRG; pendampingan OPD dalam penyusunan PPRG serta pelaksanaan review analisis gender oleh Inspektorat sehingga mendorong OPD dalam penyusunan RKA menerapkan mekanisme PPRG.

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, dengan Indikator dan target Kinerja Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender sebesar 97.06 %, Pada tahun 2024 terealisasi sebesar 91.18 %. Sehingga capaian program menjadi sebesar 93.94 % dengan predikat “Sangat Tinggi”. Meskipun capaian kinerja berada pada kategori sangat tinggi, tetapi belum mencapai target yang ditetapkan. Dari keseluruhan OPD yang ada, masih terdapat 3 (tiga) OPD yang belum mengirimkan dokumen Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS), dan Term of Reference (TOR) untuk tahun anggaran 2024. Kondisi ini mempengaruhi capaian kinerja DP3AKB dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Sebagai upaya perbaikan ke depan, DP3AKB akan memperkuat koordinasi dengan tim anggaran



pemerintah daerah dan Tim Review RKA untuk memastikan kepatuhan OPD dalam penyusunan anggaran responsif gender.

Pada tahun 2023 juga telah menyusun Naskah Akademik tentang Perda Pengarusutamaan Gender dengan output draft Perda PUG Kota Balikpapan.

Selain itu untuk mendukung tingkat capaian program ini dilaksanakan juga advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi pada sejumlah organisasi Wanita dan pada Perguruan Tinggi. Kegiatan ini diharapkan para perempuan mampu memahami perannya baik di bidang hukum, sosial dan ekonomi. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik pada Organisasi Wanita untuk memacu keterwakilan perempuan dalam parlemen menghadapi masa Pemilu.

Melalui organisasi wanita yang ada di kota Balikpapan juga dilakukan pembinaan dan pelatihan pada industri rumahan yang dikelola para perempuan sehingga mampu meningkatkan pendapatannya para perempuan

Pada tahun 2023 kota Balikpapan juga telah dilakukan verifikasi lapangan oleh Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dimana Balikpapan diberi penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dengan kategori Madya. Kategori yang diberikan meningkat satu tingkat bila dibandingkan tahun 2021 dimana Balikpapan baru masuk kategori pertama.

- 2) Program Perlindungan Perempuan dengan tingkat capaian - 350,24%

Untuk mendukung Program ini dilakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Kota



dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan edukasi, penguatan kapasitas SDM bagi kader Seksi perlindungan perempuan dan anak Tingkat RT (Seksi PPA RT). Dengan kondisi dimana kegiatan dilaksanakan secara terjadwal, capaian Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan yang ditargetkan pada tahun 2024 adalah 8,36% tercapai sebesar 46%, Hal ini bila dilihat dari target kinerja yang direncanakan memang tidak berhasil dikarenakan kasus kekerasan semakin meningkat seyogyanya mengalami penurunan, namun bila ditelaah lebih lanjut menjadi keberhasilan program dikarenakan masyarakat mempunyai keberanian dalam mengungkapkan/melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di lingkungannya yang selama ini dianggap tabu dan cenderung ditutupi karena adanya perasaan malu sehingga digambarkan sebagai fenomena gunung es. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi juga didukung dari aktivis PPATBM (Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu berbasis Masyarakat) dan seksi PPA. Disamping itu dengan meningkatnya kasus tentunya diimbangi dengan pemberian layanan penanganan korban KtPA melalui Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dimana capaian Prosentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan yang mendapatkan layanan komprehensif sebesar 118,69% , dengan pemberian layanan dan pendampingan kepada perempuan dan anak yang mendapatkan kekerasan, baik yang sifatnya fisik, psikis, seksual dan penelantaran yang dilakukan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Pada tahun 2024 jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan pengaduan di UPTD PPA memiliki tingkat capaian 302,63%



Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian Prosentase Kecamatan yang memiliki Layanan Pusat Pembelajaran (PUSPAGA) sebesar 160%, hal ini menggambarkan bahwa DP3AKB berupaya mendekatkan pelayanan konseling dan konsultasi oleh psikolog secara gratis yang dapat menjangkau seluruh masyarakat di Kota Balikpapan yang mana selama ini bahwa pelayanan konsultasi ke psikolog dianggap hanya dapat dijangkau oleh keluarga yang mampu, sehingga dengan adanya layanan PUSPAGA yang tersebar di 6 kecamatan yaitu:

- Puskesmas Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat;
- Puspaga Harapan 3 Kantor Kecamatan Balikpapan Utara;
- Gedung Perpustakaan Arsip dan Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah
- Puspaga Harapan 1 Kantor Disdukcapil-DP3AKB
- Puspaga Harapan 2 Gedung Balai Penyuluh Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan dan
- Puspaga pada Kecamatan Balikpapan Timur



Gambar 1.9
Puspaga Kecamatan Balikpapan Timur
Sumber: Dokumentasi DP3AKB

Dengan adanya pelayanan PUSPAGA akan mendekatkan keluarga, masyarakat dan orang tua dapat melakukan konsultasi gratis terkait pengasuhan anak, remaja dan keluarga. Melalui Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota itu memiliki tingkat capaian sebesar 160 %. Tahun 2023 Puspaga Harapan Kota Balikpapan menerima piagam penghargaan dari Kementerian PPPA sebagai Puspaga Memenuhi Standarisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan peringkat PUSPAGA Ramah Anak.

3) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan tingkat capaian 105,23%

Pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Kota Balikpapan sejumlah 12 Perangkat daerah sudah memiliki data terpilah sehingga tingkat capaian senilai 100% sesuai yang ditargetkan. Adapun Perangkat daerah tersebut adalah: DP3AKB, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, Dinas Kesehatan, DP3, DPMPTSP, Dinas Sosial, Disputakar, DKUKMP dan Sekretariat DPRD. Untuk mendukung kegiatan ini



DP3AKB secara rutin melakukan sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan pengelolaan data secara terpilih. Dan data terpilih sudah di tampilkan pada aplikasi Satu Data milik Kota Balikpapan

- 4) Program Pemenuhan Hak Anak dengan capaian 100 %
Kondisi ini menggambarkan dari 5 Kluster KLA (Kluster I: Hak Sipil Kebebasan, Kluster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kluster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Kluster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, Kluster V: Perlindungan Khusus Anak, tambahan Kelembagaan dan Kecamatan /Desa/Kelurahan Layak Anak) dengan total 31 indikator dan 231 pertanyaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melakukan evaluasi dan menindaklanjuti hasil penilaian KLA dengan memberikan rekomendasi dari 31 indikator dan 231 pertanyaan, telah ditindaklanjuti sejumlah 155 pertanyaan yang diruangkan dalam penilaian dengan total nilai evaluasi KLA adalah 732 sehingga tahun 2023 Balikpapan mendapatkan peningkatan Predikat Kota Layak Anak semula kategori Nindya menjadi Utama, sementara Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten /Kota capaian Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dibina teralisasi 34 lembaga dari target sejumlah 21 Lembaga sehingga capaiannya adalah 100%, pembinaan lembaga ini terus diintensifkan karena sasaran dalam 5 tahun target Renstra 2021-2026. Selain itu juga dilakukan upaya advokasi kebijakan dan pendampingan kepada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha tentang Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha. Pada kegiatan ini dilaksanakan pelatihan



Pemenuhan Hak Anak (PHA) dimana peserta yang mengikuti pelatihan diberikan sertifikasi dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan RI.

5) Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak dengan target Persentase Penyelesaian Penanganan Klien pada UPTD PPA dengan tingkat capaian sebesar 106,67%

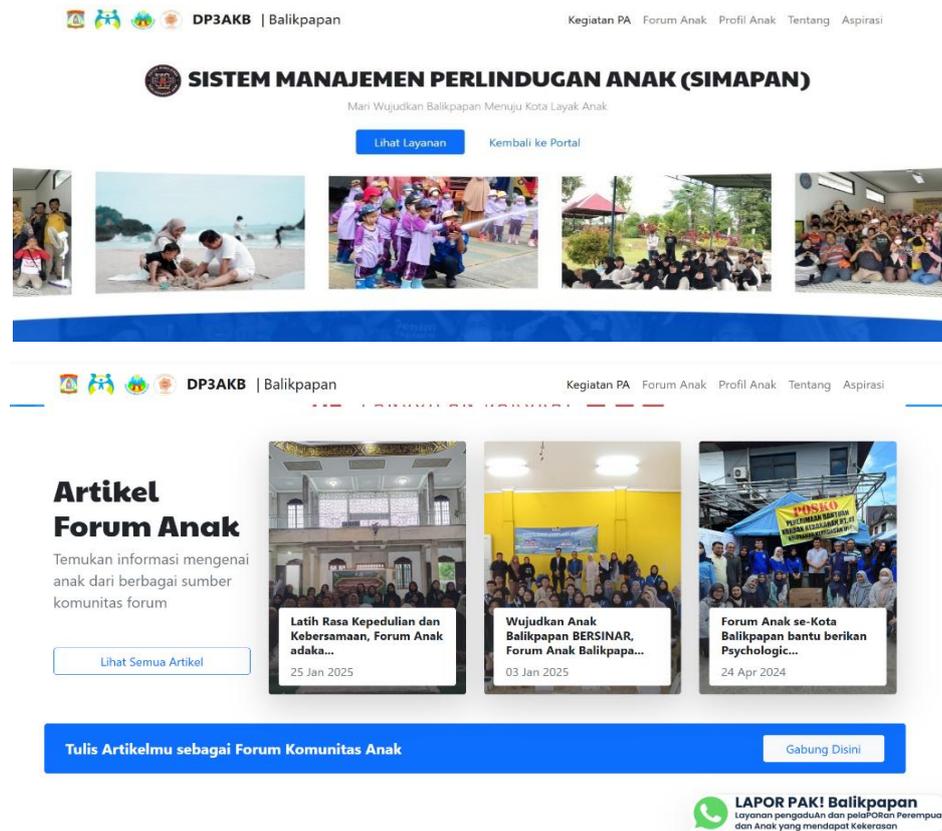
Kondisi ini menggambarkan jumlah kasus selama tahun 2024 yang masuk di UPTD PPA sejumlah 250 kasus sudah selesai penanganan dan dinyatakan inkrah sejumlah 212 kasus sementara masih dalam proses penanganan kasus sejumlah 8 kasus. Oleh karenanya dengan jumlah kasus yang masih dalam proses penanganan tetap menjadi tugas dari UPTD PPA dalam melakukan pendampingan. Untuk mendukung sasaran strategis ini beberapa kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota di targetkan Persentase Wilayah RT terpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak adalah 11 % dari total RT sejumlah 1784 Rt dan realisasinya tercapai 19 %, artinya wilayah RT yang telah terpapar regulasi perlindungan anak sejumlah 339 RT.

Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Prosentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus target tahun 2024 adalah 0,011 % dengan realisasi 0,052 % yang artinya tidak tercapai target yang diharapkan karena melebihi target yang ditetapkan dengan tingkat capaian -472,7 % kondisi ini diartikan bahwa indikator kinerja ini capaiannya adalah **indikator negatif** yang seharusnya permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum makin kedepan makin berkurang, namun hal ini sejalan



dengan tingkat perkembangan teknologi dan perkembangan kota yang berakibat dampak sosial juga makin meningkat, oleh karenanya menjadi tantangan kedepan bagi DP3AKB khususnya UPTD PPA dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) agar pemenuhan hak anak nya tetap dapat terpenuhi.

Dalam mendukung kegiatan, di bidang Perlindungan Anak memiliki beberapa Inovasi yaitu Inovasi PIN EMAS, SIMAPAN dan Lapor PAK! Inovasi PIN EMAS merupakan strategi inovasi melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung kota Balikpapan menuju Kota Layak Anak. Strategi ini dilaksanakan melalui pendekatan sinergitas, kolaborasi, koordinasi hexahelix yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, media massa, dan Forum Anak. Sedangkan Inovasi SIMAPAN (Sistem Manajemen Perlindungan Anak) adalah pendekatan yang dirancang untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan anak-anak dalam berbagai konteks, seperti keluarga, sekolah, komunitas dan institusi lainnya. Tujuannya adalah memberikan lingkungan yang aman, mendukung perkembangan optimal mereka dan mencegah segala bentuk kekerasan, penelantaran atau eksploitasi. Sedangkan Inovasi Lapor Pak! merupakan Layanan Pengaduan dan Pelaporan Perempuan dan Anak yang mendapat kekerasan yang merupakan hotline pengaduan bagi masyarakat Balikpapan terkait kekerasan pada perempuan dan anak.



Gambar 1.10.
Screenshoot Aplikasi SIMAPAN dan LAPOR PAK!
Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan

2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kesertaan PUS ber- KB

Dari tabel 3.9 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (*Modern Contraceptive Prevelence Rate/ mCPR*) terlaksana melalui beberapa program yaitu:

- 1) Program pengendalian Penduduk dengan tingkat capaian sebesar 121,21%

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program ini adalah Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan indicator Persentase Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan jalur formal terbentuk dijenjang SD/ MI yang memiliki target 20,83% dan terealisasi sebesar 20,62%. Dan untuk persentase Satuan



Pendidikan Siaga kependudukan jalur formal terbentuk di jenjang SLTP/MTS target yang ditetapkan sebesar 24,1% dan berhasil terealisasi sebesar 26,32% atau tercapai 109,21 %. Selain itu ada juga kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Penyusunan Rekomendasi kebijakan terkait Pengendalian Penduduk yang memiliki target 1 dokumen telah terealisasi dengan tersusunnya 1 (satu) dokumen Grand Design kependudukan pada tahun 2024.

- 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana dengan tingkat capaian program 108,4 %

Pada program Pembinaan KB persentasi Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tapi tidak terpenuhi (*unmet need*) masih cukup tinggi yaitu 12% walaupun jumlah PUS yang ber KB aktif per waktu triwulan cenderung meningkat tapi belum mencapai target yang ditetapkan di tahun 2024 dan nilai MCPR juga meningkat. Angka unmet need ini memang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, Persentase unmet need yang tinggi terdapat pada kelompok wanita dengan usia muda dan juga pada kelompok usia tua, mereka yang tidak mempunyai anak dan yang mempunyai satu anak, serta wanita yang memiliki jumlah anak hidup lebih dari lima anak. Alasan yang dikemukakan untuk tidak menggunakan kontrasepsi adalah alasan kesehatan, efek samping, larangan penggunaan (suami keluarga, dan masyarakat), dan kurangnya informasi. Kegiatan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis untuk meningkatkan kesertaan PUS ini telah dilakukan juga melalui kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan Tingkat capaian 92,45%.



Kemudian kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan indikator Jumlah Kelompok IMP terbina oleh PKB memiliki tingkat capaian sebesar 100%.

Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Kepesertaan KB MKJP realisasinya adalah 109,09%,

Hal ini juga didukung penyediaan sarana penunjang pelayanan KB bersumber dari dana DAK dengan tingkat capaian 100% Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya dilakukan melalui pelaporan rutin yang disampaikan.

Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan indikator Jumlah intervensi pada Kampung KB realisasinya adalah sebesar 100%. Kegiatan ini mendorong agar kampung KB mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di wilayah masing-masing. Saat sekarang jumlah kampung KB yang sudah melaksanakan Program Bangga Kencana ada 34 kampung sesuai target yang ditetapkan dengan tingkat capaian 100%.

Promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang. Untuk meningkatkan kesertaan PUS dilakukan pembinaan pada Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Program KKBPK di lini lapangan melalui pendayagunaan Penyuluh KB (PKB)/Petugas Lapangan KB (PLKB). Kelompok IMP (institusi masyarakat pedesaan) sejumlah 34 kelompok sudah



seluruhnya terbina oleh PKB, Kolaborasi yang baik antara PKB selaku pembina wilayah Kelurahan dengan kader IMP (PPKBD dan Sub PPKBD) diharapkan mampu meningkatkan cakupan akseptor pasangan usia subur (PUS) muda.

Salah satu aktivitas penting IMP adalah membuat laporan bulanan kepada PKB/PLKB tentang:

- a. kegiatan IMP dalam melakukan pencatatan secara rutin dan ikut melaksanakan pendataan keluarga;
- b. kegiatan IMP Bersama Penyuluh KB membuat dan melakukan pemetaan sasaran (demografi, tahapan KS dan sebagainya);
- c. kegiatan IMP dalam memanfaatkan hasil pendataan dan peta sasaran bagi kepentingan pembinaan di tingkat wilayahnya; serta
- d. intervensi kegiatan-kegiatan di wilayahnya berdasarkan peta PUS yang telah dibuat.

Kader IMP di dalam tugasannya melakukan beberapa kegiatan, seperti: pembinaan tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP), antara lain usia ideal bagi pria dan wanita untuk menikah (25 dan 21 tahun), Kesehatan reproduksi, Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual, Penyalahgunaan NAPZA dan lain sebagainya. Selain itu, IMP juga melakukan pembinaan mengenai pengaturan kelahiran antara lain pemakaian alat kontrasepsi sesuai umur dan kondisi kesehatan ibu, jumlah anak, jarak kelahiran dan umur anak terkecil.

Dalam mendukung Sasaran ke 2 ini terdapat Inovasi bidang Ketahanan Keluarga yaitu Inovasi SIRSAK (Sinergi Kolaborasi Peningkatan Pendapatan Usaha Akseptor). SIRSAK merupakan yang mensinergikan dan mengkolaborasikan program kegiatan yang berada diperangkat daerah terkait, perguruan tinggi dan kelompok



UPPKA dalam mengembangkan kelompok UPPKA agar lebih baik dan lebih dikenal masyarakat luas.

3. **Sasaran Strategis 3:** Meningkatnya Kelurahan Katergori Berkembang

Dari tabel 3.8 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Persentase Kelurahan Kategori Bekembang tercapai sebesar 100% Indikator ini telah tercapai melalui program :

1) Program administrasi pemerintahan desa dengan tingkat capaian 100%

Program ini terlaksanan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dengan capaian indikator jumlah kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi sebesar 100% serta

2) Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat

Program ini terlaksana melalui kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan capaian indicator presentase lembaga masyarakat kelurahan yang diberdayakan sebesar 100,54%. Adanya dukungan surat dari Gubernur Kalimantan Timur Nomor 414.4/1193/SJ tanggal 31 Maret 2023 tentang penginputan Epdeskel dan pelaksanaan Lomba Desa dan kelurahan Tahun 2023, kondisi ini memacu kelurahan untuk melengkapi data Epdeskel serta dukungan dari Kecamatan untuk mensupport seluruh kelurahan dalam melakukan update data melalui aplikasi Epdeskel.



Pada Lembaga Kemasyarakatan juga dilakukan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, baik melalui sosialisasi, kegiatan pembelajaran praktek baik ke daerah lain. Selain itu pada seluruh kelurahan juga dilakukan fasilitasi dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dimana pada Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dilakukan lomba Teknologi Tepat Guna.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki Inovasi bernama **KOPY TETANGGA** (Kolaborasi Pengelolaan Posyantek dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna) yaitu upaya untuk melakukan pengelolaan Posyantek secara kolaborasi dengan instansi terkait, Kolaborasi dengan membuat payung hukum bagi Posyantek melalui Peraturan Walikota dan kolaborasi dengan Dinas Kominfo dalam membuat pemetaan secara digital untuk memperkenalkan Posyantek dan mempromosikan produk Teknologi Tepat Guna, dimana outputnya adalah meningkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan di kota Balikpapan.

4. **Sasaran Strategis 4:** Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan, program yang terkait dengan Sasaran Strategis ini adalah Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal) 97,59%.

Nilai IKM masyarakat intern(pegawai) diambil dari survey internal yang disebar keseluruh pegawai DP3AKB (ASN, Non ASN dan PKB) berdasarkan link kuisisioner yang dilakukan penilaian.



Sementara untuk nilai SAKIP dilakukan penilaian oleh tim Evaluator dari Inspektorat.

Kegiatan yang menunjang program ini adalah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Tingkat capaian IKM Internal 96,39 %

3.2.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DP3AKB Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Adapun analisis atas penggunaan sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Demikian pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan diketahui bahwa kebutuhan personil ASN berjumlah 90 orang. Namun untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan hanya didukung oleh 51 orang ASN (Pegawai Pemkot dan Pegawai Pusat), dengan demikian dengan SDM



hanya 51 orang dari seharusnya sekitar 90 orang dalam melaksanakan tugas dan fungsi DP3AKB dinilai masih efektif.

Tabel 3.11 Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) DP3AKB menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki – laki (L)	Perempuan (P)
1	JABATAN STRUKTURAL	1	8
2	JABATAN FUNGSIONAL	0	25
3	JABATAN PELAKSANA	5	12
Jumlah		6	45

Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan

Adapun data sumber daya manusia aparatur dapat dilihat dari tingkat pendidikan sebagaimana tertuang dalam diagram/ tabel berikut:

Tabel 3.12. Komposisi / Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS) DP3AKB menurut tingkat pendidikan

Kualifikasi Pendidikan	Kebutuhan	Bezzeting/ Keadaan	Persentase
SMA/ D1/D2	15	6	6,7%
D3	17	11	12,2%
D4/ S1	58	30	33%
S2	0	4	4,4%
TOTAL	90	51	56,7%

Sumber: Kepegawaian DP3AKB Tahun 2024

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan di dominasi oleh kualifikasi pendidikan S1 berjumlah 30 orang atau 33 % dari target kebutuhan (90 orang), kemudian diikuti oleh pendidikan Diploma 3 (D3) berjumlah 11 orang atau 12,2% dari target kebutuhan kemudian disusul SLTA/D1/D2 berjumlah 6 orang atau 6,7 % dari target kebutuhan dan S2 berjumlah 4 orang atau 4,4 %. Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang



dimiliki, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan melakukan optimalisasi personil dengan menambah beban tugas terhadap personil yang ada dan mengusulkan tambahan pegawai ke BKPSDM Kota Balikpapan, serta pengangkatan Tenaga Kontrak serta tenaga ahli untuk tenaga Psikologi Klinis.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana

Analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan adalah penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Adapun sarana prasana yang dimiliki oleh Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut:



Table 3.13 Jumlah asset yang dimiliki dan yang tidak terpakai

No.	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (Rp)		Jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.	Unit	Rp.	
1	Mobil	8	1.313.393.500,00	-	-	
2	Sepeda Motor	50	1.113.721.510,00	-	-	
3	Personal Computer	39	337.908.700,00	-	-	
4	Printer	42	170.859.100,00	-	-	
5	Laptop	30	321.413.250,00	-	-	
6	Air Conditioner	17	63.142.000,00	-	-	
7	Televisi	1	24.310.000,00	-	-	
8	Sound System	4	60.537.860,00	-	-	
9	CCTV	4	32.593.000,00	-	-	
10	Mesin Absensi	1	14.795.000,00	-	-	
11	Kamera	2	19.316.000,00	-	-	
12	LCD Proyektor	4	27.562.500,00	-	-	
13	Peralatan Permainan Anak	19	741.000.000,00	-	-	
14	Aset Lainnya	212	1.935.406.349,80	-	-	
	Jumlah		6.175.958.769,80			

Sumber: Sub bagian umum DP3AKB Kota Balikpapan



3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pengukuran efisiensi anggaran diadaptasi dari pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)

PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Sedangkan untuk mengukur Efektivitas (hasil guna) dapat diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Target Kinerja} / \text{Rencana Anggaran})}{(\text{Realisasi Kinerja} / \text{Realisasi Anggaran})} \times 100 \%$$



Tabel 3.14 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (E)	Tingkat Efektifitas
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70.5	72	102.13%	8,970,289,099	8,096,791,689	90%	12%	88%
2	Meningkatnya Kesertaan PUS ber- KB	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevelence Rate/ mCPR)	70.65%	64.45%	91%	8,970,544,000	8,464,175,999	94%	-3%	103%
3	Meningkatnya Kelurahan Katergori Berkembang	Persentase Kelurahan Kategori Berkembang	100%	100%	100%	9,013,749,730	8,168,415,867	91%	9%	91%
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DP3AKB	84.42%	64.64%	76.57%	11,507,651,176	10,194,974,643	89%	-16%	116%

Sumber: Laporan Evaluasi Renja DP3AKB ,2024



Berdasarkan tabel 3.11. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat diketahui bahwa antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relatif baik karena meskipun anggaran tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan tahun 2024 telah mencukupi serta terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan anggaran yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian **sasaran strategis 1** telah mencukupi dengan capaian kinerja 102,13% dan capaian penyerapan anggaran 90% sehingga terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 12%. Hal tersebut terjadi karena harga pembelian barang di pasaran lebih rendah dari harga standar barang dan jasa yang ada di SIPD dan perjalanan dinas dibelanjakan sesuai kebutuhan, serta transportasi akomodasi dan honorarium narasumber disesuaikan dengan standart eselonisasi. Ada penghematan anggaran dari beberapa sub kegiatan yang dikolaborasikan dengan sub kegiatan lain.
- 2) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian **sasaran strategis 3** telah mencukupi dengan capaian kinerja 100% dan capaian penyerapan anggaran 91% dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 9 %. Efisien tersebut terjadi pada program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat masyarakat dan hukum adat pada kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta sub kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat karena adanya LPM yang tidak merealisasikan kegiatannya dan tidak Semua



LPM mengambil dana hibah yang sudah disiapkan berdasarkan usulan dan proposal hibah yang diterima oleh DP3AKB Kota Balikpapan.

Di samping itu, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebagaimana tabel Tabel 3.11 juga dapat diketahui bahwa terdapat capaian kinerja yang tidak mencapai 100% dan anggarannya juga tidak terserap 100% sehingga tidak dapat diakui efisien dan efektivitas penggunaan anggarannya yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian **sasaran strategis 2** terserap 94 % sehingga mempengaruhi capaian kinerja yang hanya 91% . Hal tersebut terjadi karena adanya target yang tidak tercapai yaitu kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang khususnya Metode Operasi Wanita (MOW) dan pembentukan kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Remaja (BKR) yang tidak mencapai target karena rendahnya minat keluarga untuk menjadi anggota BKR.
- 2) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian **sasaran strategis 4** terserap 89% sehingga mempengaruhi capaian kinerja yang hanya 76,57%. Hal ini terjadi karena capaian anggaran yang tersedia tidak diikuti dengan capaian kinerja yang telah ditargetkan. Hal ini disebabkan nilai SAKIP tahun 2023 berdasarkan penilaian hasil penilaian Tim Evaluator SAKIP dari Inspektorat baik dari segi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas belum mencapai target. Terdapat juga efisiensi anggaran pada beberapa sub kegiatan (Silpa Positif) yaitu sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, masih ada sisa anggaran sebesar Rp 853,970,653 atau 10,88% karena ada pegawai yang pensiun dan gaji berdasarkan kondisi kerja yang tidak diserap. Kemudian sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor masih ada sisa dana Rp 90,769,200 atau 14,56% yang merupakan silpa positif hasil negosiasi pengadaan.

Berdasarkan tabel 3.11. Hasil efektifitas Tahun 2024 dapat



dijabarkan sebagai berikut :

- 1) **Sasaran Strategis 1** dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) telah mencapai 88 % termasuk kategori cukup efektif. Hal ini menunjukkan kualitas dan kuantitas yang baik dalam mengatasi kesenjangan gender, Hal ini ditunjang adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
- 2) **Sasaran Strategis 2** dengan indikator Indeks Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR*) mencapai 103 % termasuk kategori sangat efektif. Meskipun kegiatan program pengendalian penduduk, program keluarga berencana (KB) dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera tahun 2024 telah efektif di laksanakan, namun masih ada yang belum memenuhi target yaitu kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang khususnya MOW dan pembentukan kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Remaja (BKR) yang tidak mencapai target.
- 3) **Sasaran Strategis 3** dengan indikator Persentase Kelurahan Kategori Berkembang mencapai 91% termasuk kategori efektif. Hal Ini menunjukkan keberhasilan kegiatan pembangunan di seluruh Kelurahan sepanjang tahun 2024.
- 4) **Sasaran Strategis 4** dengan indikator Nilai SAKIP DP3AKB mencapai 116 % termasuk kategori sangat efektif . Anggaran yang disediakan sangat efektif untuk menaikkan Nilai SAKIP, walaupun target yang ditetapkan di Tahun 2023 belum tercapai. Hasil penilaian Tim Evaluator SAKIP dari Inspektorat Predikat yang diperoleh DP3AKB adalah 64,64 (kategori **B**) untuk evaluasi SAKIP 2023.



3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja, dimana penyerapan anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar 90,80 % dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran DP3AKB Tahun 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	CAPAIAN
	Sasaran : Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,507,651,176	10,194,974,643	89%
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,850,187,000	6,996,216,347	89%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,850,187,000	6,996,216,347	89%
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,645,372,626	1,491,709,641	91%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	623,428,200	532,659,000	85%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	407,787,700	380,020,300	93%
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	108,083,600	77,244,625	71%
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	22,764,700	18,990,000	83%
6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	483,308,426	482,795,716	100%
3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	784,384,000	722,048,000	92%
7	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	784,384,000	722,048,000	92%
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	436,291,600	333,703,298	76%
8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94,861,600	27,699,059	29%
9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	341,430,000	306,004,239	90%
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	791,415,950	651,297,357	82%



NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	CAPAIAN
10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	523,420,200	429,568,775	82%
11	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	167,652,000	124,607,410	74%
12	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,343,750	97,121,172	97%
	SASARAN : Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak			
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1,219,892,599	1,113,601,769	91%
6	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	649,892,599	549,496,686	85%
13	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	254,562,599	245,028,755	96%
14	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	395,330,000	304,467,931	77%
7	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	570,000,000	564,105,083	99%
15	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	370,000,000	364,315,000	98%
16	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	200,000,000	199,790,083	100%
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1,205,750,000	1,042,637,628	86%
8	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	755,470,000	700,519,364	93%
17	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	755,470,000	700,519,364	93%
9	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	235,480,000	151,197,064	64%
18	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	235,480,000	151,197,064	64%



NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	CAPAIAN
10	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	214,800,000	190,921,200	89%
19	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	214,800,000	190,921,200	89%
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1,288,700,000	1,181,319,834	92%
11	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,288,700,000	1,181,319,834	92%
20	Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1,288,700,000	1,181,319,834	92%
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	348,300,000	325,850,905	94%
12	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	348,300,000	325,850,905	94%
21	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	348,300,000	325,850,905	94%
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2,977,686,500	2,834,793,362	95%
13	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	597,900,000	527,078,421	88%
22	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	597,900,000	527,078,421	88%
14	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2,379,786,500	2,307,714,941	97%
23	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,379,786,500	2,307,714,941	97%
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1,929,960,000	1,598,588,191	83%
15	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	760,200,000	716,948,520	94%
24	Sub Kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	760,200,000	716,948,520	94%



NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	CAPAIAN
16	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	840,000,000	626,635,046	75%
25	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	840,000,000	626,635,046	75%
17	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	329,760,000	255,004,625	77%
26	Sub Kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	329,760,000	255,004,625	77%
	Sasaran : Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang			
VIII	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	686,990,000	392,039,878	57%
18	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	686,990,000	392,039,878	57%
27	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	331,550,000	194,053,950	59%
28	Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	355,440,000	197,985,928	56%
IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	8,326,759,730	7,776,375,989	93%
19	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	8,326,759,730	7,776,375,989	93%
29	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	760,000,000	745,000,000	98%
30	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3,127,273,530	2,700,041,348	86%
31	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	710,000,000	677,410,054	95%



NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	CAPAIAN
32	Sub Kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	333,585,000	328,548,380	98%
33	Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3,395,901,200	3,325,376,207	98%
	Sasaran : Meningkatnya Kesertaan PUS ber-KB			
X	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1,156,900,000	1,086,087,060	94%
20	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	328,200,000	296,963,944	90%
34	Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	328,200,000	296,963,944	90%
21	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	828,700,000	789,123,116	95%
35	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	800,000,000	761,045,516	95%
36	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	20,400,000	20,400,000	100%
37	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	8,300,000	7,677,600	93%
XI	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2,831,434,000	2,632,001,841	93%
22	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	651,100,000	595,393,700	91%
38	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	211,650,000	202,254,200	96%
39	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	22,100,000	21,900,000	99%
40	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	132,350,000	127,600,000	96%
41	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	185,000,000	177,654,500	96%
42	Sub Kegiatan Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100,000,000	65,985,000	66%
23	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	471,230,000	450,749,981	96%



NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	CAPAIAN
43	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	102,000,000	102,000,000	100%
44	Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	139,230,000	134,549,773	97%
45	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	230,000,000	214,200,208	93%
24	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1,324,154,000	1,205,205,560	91%
46	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	762,609,000	695,095,000	91%
47	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	205,195,000	173,500,000	85%
48	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	356,350,000	336,610,560	94%
25	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	384,950,000	380,652,600	99%
49	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	6,520,000	6,400,000	98%
50	Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB	120,000,000	117,478,600	98%
51	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	258,430,000	256,774,000	99%
XII	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4,982,210,000	4,746,087,098	95%
26	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3,709,610,000	3,496,437,098	94%
52	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat Generasi Berencana Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	300,000,000	285,198,977	95%
53	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	2,435,500,000	2,352,397,654	97%



NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	CAPAIAN
54	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	286,000,000	241,173,440	84%
55	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300,000,000	290,207,652	97%
56	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	210,000,000	192,056,250	91%
57	Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	178,110,000	135,403,125	76%
27	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1,272,600,000	1,249,650,000	98%
58	Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	606,000,000	594,900,000	98%
59	Sub Kegiatan Pendampingan keluarga berisiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon pus, ibu hamil, pasca/kelahiran, baduta/balita)	666,600,000	654,750,000	98%
	TOTAL	38,462,234,005	34,924,358,198	90.8%

Sumber : Form E.81 Aplikasi REAKSI Bappeda Kota Balikpapan



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tahun 2024, merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra tahun 2021-2026 sesuai dengan Rencana kerja Wali Kota terpilih. DP3AKB Kota Balikpapan telah melaksanakan seluruh Program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut, sebagai wujud pelaksanaan pertanggungjawaban kinerja Organisasi Perangkat Daerah DP3AKB, maka dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) DP3AKB Kota Balikpapan Tahun 2024 dapat disusun.

Prosentase capaian kinerja Sasaran Strategis DP3AKB Kota Balikpapan pada tahun 2024, yang merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Renstra DP3AKB (2021 – 2026) adalah:

- ✓ **Sasaran 1:** Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender senilai 72 % , dengan capaian akuntabilitas keuangan adalah sebesar 90 %.
- ✓ **Sasaran 2:** Meningkatnya Kesertaan PUS ber-KB dengan indikator Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR) realisasi sebesar 64,45 % dengan capaian akuntabilitas keuangan 94%.
- ✓ **Sasaran 3:** Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang dengan Indikator Persentase Kelurahan Kategori Berkembang sebesar 100 % dengan capaian akuntabilitas keuangan 91 %, dan
- ✓ **Sasaran 4:** Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator Nilai SAKIP DP3AKB 64,64 % dengan capaian akuntabilitas keuangan 89 %



B. SARAN

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan DP3AKB Tahun 2024 yang sudah diulas dalam dokumen ini, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh DP3AKB untuk meningkatkan kinerjanya adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukan komitmen bersama seluruh pegawai DP3AKB untuk meningkatkan kinerja masing-masing dan mempelajari /memahami serta meimplementasikan regulasi teknis terkait tupoksi masing-masing, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD dapat dilakukan secara efektif dan efisien ;
- b. Adanya regulasi penambahan tugas urusan Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi wewenang DP3AKB maka diperlukan tidak hanya komitmen dan koordinasi tapi juga penambahan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana agar capaian kinerja bisa lebih optimal;
- c. Dengan adanya Program E-Visum dari BKKBN Pusat maka sistem pendataan dan pelaporan dari Para penyuluh KB di lapangan, data layanan KB dan data hasil pembinaan terkait program KKBPK (Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga) atau Bangsa Kencana akan semakin mudah dan benar-benar terekam dan dilaporkan dengan baik sesuai kondisi fakta di lapangan, yang akhirnya bisa memberikan data kinerja yang riil sesuai fakta di lapangan ;
- d. Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis pengarusutamaan gender pengarusutamaan gender, yang merupakan tujuan dari Renstra 2021-2026 diperlukan komitmen bersama dan koordinasi lintas program dan lintas sektor agar target yang ditetapkan dapat tercapai.
- e. meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan perlu dilakukan peningkatan intensitas sosialisasi terkait regulasi perlindungan perempuan dan anak, mengingat meningkatnya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di tahun 2024, meskipun ada kemungkinan juga bahwa meningkatnya jumlah data korban



karena semakin banyak warga/ korban yang berani melapor yang merupakan efek gencarnya sosialisasi kepada masyarakat terkait Perlindungan Perempuan dan Anak serta keberadaan lembaga layanan penanganan kasus yang dikelola UPTD PPA Pemerintah Kota Balikpapan.

- f. Penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan akan disesuaikan dengan Dokumen Renstra OPD DP3AKB Tahun 2021-2026 dan dokumen perencanaan lainnya Untuk capaian yang mengalami peningkatan secara signifikan di tahun 2024 sudah dilakukan perubahan Perjanjian Kinerjanya menyesuaikan capaian tahun berjalan.

Demikian dokumen Pelaporan Kinerja DP3AKB Tahun 2024 ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala DP3AKB Kota Balikpapan

Ir. Heria Prisni



LAMPIRAN



Lampiran 1. SK Indikator Kinerja Utama (IKU)



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
(DP3AKB)

Jl. MT. HARYONO RI.26 NOMOR 186 KELURAHAN SUNGAINANGKA, KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN,
KOTA BALIKPAPAN

Telp. dan fax: (0542) 424808 Email : dppakbkotabalikpapan@yahoo.com / dp3akbbalikpapan18@gmail.com

Kode Pos : 76114

KEPUTUSAN
KEPALA DP3AKB
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 188.A6-242/DP3AKB-SKT

TENTANG
PERUBAHAN KE III INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2021 – 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BALIKPAPAN

- Menimbang :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;
 - Bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan, program dan kegiatan dan untuk memenuhi standar penilaian akuntabilitas perlu dilakukan review terhadap Definisi operasional indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan ;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan KEPALA DP3AKB
- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa ;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026.
 - Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Keputusan KEPALA DP3AKB tentang Perubahan Ke III Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan.



- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 02 Juli 2024





**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BALIKPAPAN**

Lampiran : Keputusan Kepala DP3AKB
 Nomor : 188.46 - 242/DP3AKB-SKT
 Tanggal : 02 Juli 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN
					FORMULASI/CARA PENGUKURAN			
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	Indikator digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan Gender berdasarkan partisipasi Politik, pengambilan keputusan dan partisipasi ekonomi	1/3 (Ipar + IDM + linc-dist) ; Ipar = Indeks Keterwakilan di parlemen IDM = Indeks pengambilan keputusan Linc-dist = Indeks distribusi pendapatan	BPS		
2	Meningkatnya Kesetaraan PUS ber-KB	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR) *100	%	Penggunaan indikator kinerja seperti itu adalah bahwa untuk mengukur sampai sejauh mana kesetaraan PUS ber-KB meningkat adalah dengan alat ukur perhitungan prosentase pemakaian alat kontrasepsi oleh PUS (CPR)	Jumlah peserta KB Aktif dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100 peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan	Dallap (Laporan Pengendalian Lapangan) yang dimiliki oleh DP3AKB	Cukup Jelas	



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN																																	
					FORMULASI/CARA PENGUKURAN																																				
3	Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang	Persentase Kelurahan Kategori Berkembang	%	Tingkat perkembangan kelurahan merupakan status tertentu dari capaian hasil dari kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Kategori berkembang dibagi jumlah Kelurahan dikali 100	Sesuai Permenpan RB No. 88 Tahun 2021, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Komponen</th> <th colspan="3">Indikator Kinerja</th> <th rowspan="2">Total Nilai</th> </tr> <tr> <th>Indikator 1</th> <th>Indikator 2</th> <th>Indikator 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>5</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Pengalokasian Anggaran</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Pengelolaan Keuangan</td> <td>7</td> <td>6,3</td> <td>2,3</td> <td>15,6</td> </tr> <tr> <td>Tata Kelola Pemerintahan</td> <td>5</td> <td>2,5</td> <td>1,5</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Total Akuntabilitas Kinerja</td> <td>24</td> <td>20</td> <td>14</td> <td>58</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Indikator Kinerja			Total Nilai	Indikator 1	Indikator 2	Indikator 3	Perencanaan Kinerja	8	9	5	22	Pengalokasian Anggaran	4	3	5	12	Pengelolaan Keuangan	7	6,3	2,3	15,6	Tata Kelola Pemerintahan	5	2,5	1,5	9	Total Akuntabilitas Kinerja	24	20	14	58	Lampiran Permendagri 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi perkembangan Kelurahan Desa atau Kelurahan	Indikator data dan nilai perkembangan desa
Komponen	Indikator Kinerja			Total Nilai																																					
	Indikator 1	Indikator 2	Indikator 3																																						
Perencanaan Kinerja	8	9	5	22																																					
Pengalokasian Anggaran	4	3	5	12																																					
Pengelolaan Keuangan	7	6,3	2,3	15,6																																					
Tata Kelola Pemerintahan	5	2,5	1,5	9																																					
Total Akuntabilitas Kinerja	24	20	14	58																																					
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DP3AKB	Nilai	Nilai Sakip adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diperoleh dari hasil evaluasi Tim Penilai Internal (Auditor Inspektorat).		Laporan Hasil Evaluasi AKIP	Cukup Jelas																																		

Ditetapkan di : Balikpapan
 Pada tanggal : Juli 2024





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. HERIA PRISNI

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD MUZAKKIR, ST., M.Si.

Jabatan : Pjs. WALI KOTA BALIKPAPAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 14 Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

AHMAD MUZAKKIR, ST., M.Si.

PIHAK PERTAMA,

Ir. HERIA PRISNI



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	70,5
2	Meningkatnya Kesertaan PUS ber-KB	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	70,65%
3	Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang	Persentase Kelurahan Kategori Berkembang	%	100%
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DP3AKB	Nilai	84,42

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.507.651.176	APBD
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 1.219.892.599	APBD
3.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 1.205.750.000	APBD+DAK
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 1.288.700.000	APBD
5.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 348.300.000	APBD
6.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 2.977.686.500	APBD
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 1.929.960.000	APBD + DAK
8.	Program Administrasi Pemerintah Desa	Rp. 686.990.000	APBD
9.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 8.326.759.730	APBD



10.	Program Pengendalian Penduduk	Rp.	1.156.900.000	APBD + DAK BOKB
11.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.	2.831.434.000	APBD + DAK BOKB
12.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp.	4.982.210.000	APBD + DAK BOKB
Jumlah Anggaran		Rp.	38.462.234.005	-

Balikpapan, 14 Oktober 2024

Pjs. WALI KOTA BALIKPAPAN,

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA,**

AHMAD MUZAKKIR, ST., M.Si.

Ir. HERIA PRISNI



Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2024 - Triwulan 4

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya Jumlah RKA Perangkat Daerah yang disusun melalui mekanisme Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Prosentase RKA Responsif Gender	%	25		0		50		0		0		0		74.03		74.03		148.06		74.03		296.12		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Melampaui target. Adanya Upaya DP3AKB mengadakan pelatihan dan pendampingan untuk OPD dalam penyusunan perencanaan responsif gender, serta Adanya dukungan regulasi dari pemerintah Kota, dimana setiap OPD dalam penyusunan RKA harus disertakan Analisis gender dalam bentuk GAP, GBS dan TOR : Total RKA Responsif Gender : 627 RKA dan Total RKA APBD Kota Balikpapan : 847
1.1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender	%	100	1,933,730,000	91.18	1,021,342,119	97.06	1,219,892,599	0	1,000,000	0	247,123,038	0	267,384,615	91.18	598,094,116	91.18	1,113,601,769	93.94	91.29	91.18	2,134,943,888	91.18	110.41	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Tidak tercapai, karena masih ada 3 OPD yang tidak mengirimkan GAP, GBS TOR Tahun 2024
1.1.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Regulasi yang mendukung pelaksanaan PPRG	dokumen	5	1,358,730,000	2	472,192,499	1	649,892,599	0	1,000,000	0	241,123,038	1	180,144,615	0	127,229,033	1	549,496,686	100	84.55	3	1,021,689,185	60	75.19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
1.1.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	OPD					34	254,562,599	0	1,000,000	33	171,706,921	0	34,376,000	0	37,945,834	33	245,028,755	97.06	96.25					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Capaian telah terealisasi di TW II, 1 OPD Tidak Hadir (DPMPTSP)
1.1.1.2	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	OPD					34	395,330,000	0	0	33	69,416,117	0	145,768,615	0	89,283,199	33	304,467,931	97.06	77.02					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Telah terealisasi di TW II, 1 OPD Tidak Hadir (DPMPTSP)
1.1.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Industri Rumah yang dibina	Jumlah	113	575,000,000	36	549,149,620	23	570,000,000	0	0	23	6,000,000	0	87,240,000	0	470,865,083	23	564,105,083	100	98.97	59	1,113,254,703	52.21	193.61	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Telah Selesai dilaksanakan di TW II



1.1.2.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten Kota	Dokumen					1	370,000,000	0	0	0	6,000,000	0	87,240,000	1	271,075,000	1	364,315,000	100	98.46				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	1 dokumen terdiri dari 2 aktivitas terkait Pelaku Industri rumah dan Pemberdayaan Organisasi Wanita, yang pelaku industri sudah dilakukan, pemberdayaan organisasi wanita	
1.1.2.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten Kota	organisasi					1	200,000,000	0	0	0	0	0	1	199,790,083	1	199,790,083	100	99.9				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Gabungan Organisasi Wanita (GOW)		
1.2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	per 100.000 Penduduk Perempuan	8.01	1,679,250,000	31,85	2,364,157,594	8.36	1,205,750,000	14,96	62,838,000	15,51	207,973,000	29,36	445,434,684	46.02	326,391,944	46.02	1,042,637,628	-350.48	86.47	46.02	3,406,795,222	574.53	202.88	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Indikator Negatif, Total 2024 = jumlah perempuan korban kekerasan termasuk TPPO : 168 jumlah perempuan DKB Semester I 2024 = 365.034 x 100.000 (Sesuai dengan jumlah kenaikan kasus yang ada dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi, serta dukungan dari aktivis PPATBM dan seksi PPART)
1.2.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Cakupan RT terpapar Regulasi Perlindungan Perempuan	%	74.66	1,078,970,000	21	1,356,890,346	16	755,470,000	16,82	0	0	178,910,000	0	434,755,784	0	86,853,580	16	700,519,364	100	92.73	37	2,057,409,710	49.56	190.68	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Telah selesai dilaksanakan di TW I, RT Terpapar Regulasi = 300 Total RT Se-Kota Balikpapan = 1.784 : Adanya perbedaan antara data perencanaan (Renstra) yang digunakan sebagai dasar penentuan target awal 1875 dan data aktual di lapangan: 1.784



No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1.2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen					1	755,470,000	1	0	0	178,910,000	0	434,755,784	0	86,853,580	1	700,519,364	100	92.73					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Telah selesai dilaksanakan di TW I Berupa dokumen MOU : Visum Et peritum dengan RSKD, dan MOU bantuan dengan POSBAKUMADIN		
1.2.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Pelatihan	lembaga	24	364,800,000	9	1,007,267,248	5	214,800,000	0	0	0	27,763,000	0	1,678,900	5	161,479,300	5	190,921,200	100	88.88	14	1,198,188,448	58.33	328.45	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana			
1.2.2.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang					120	214,800,000	0	0	0	27,763,000	0	1,678,900	120	161,479,300	120	190,921,200	100	88.88					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;			
1.2.3	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Korban Kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	0	235,480,000	0		84.25	235,480,000	100	62,838,000	100	1,300,000	100	9,000,000	100	78,059,064	100	151,197,064	118.69	64.21	100	151,197,064	0	64.21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Capaian tahun 2024 melampaui target yang telah ditetapkan. Adanya upaya SDM DP3AKB yang lebih baik dalam memberikan aksesibilitas layanan bagi korban yang disesuaikan dengan kebutuhan korban, termasuk konseling, dukungan medis, dan bantuan hukum serta komitmen yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu adanya keterlibatan Masyarakat seperti PPATBM, Seksi PPART untuk membantu memfasilitasi kejadian kekerasan terhadap Perempuan.		
1.2.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak lanjut Pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan					6	235,480,000	0	62,838,000	0	1,300,000	0	9,000,000	6	78,059,064	6	151,197,064	100	64.21					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	6 jenis layanan tindak lanjut atas kasus selama 1 tahun Capaian kinerja disesuaikan dengan kasus kondisi yang ditangani oleh UPTD PPA yang mendapatkan Layanan Pengaduan Penjangkauan, Penampungan sementara, Pendampingan, Pengelolaan kasus, Mediasi		



1.3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	%	100	2,588,700,000	100	7,465,363,689	100	1,288,700,000	100	71,213,947	100	425,019,683	100	515,956,055	100	169,130,149	100	1,181,319,834	100	91.67	100	8,646,683,523	100	334.02	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Puspaga telah ada di 6 Wilayah Kecamatan (Kec. Bal-Kot = berada DISPUTAKAR; Kec. Bal-Teng; KANTOR KEC BAL TENG dan Puskesmas Mekar Sari, Kec Bal Sel; DP3AKB Dan Balai Penyuluhan KB Sepinggian; Kantor KEC BAL-UT; Kecamatan BAL-UT; Kec. Bal-Tim; PUSK MANGGAR BARU; Kec BAL-Bar; Puskesmas Baru Tengah
1.3.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase keluarga yang mendapatkan Pelayanan PUSPAGA	%	1.35	2,588,700,000	3.69	7,465,363,689	2.5	1,288,700,000	0.76	71,213,947	1.24	425,019,683	3.70	515,956,055	4.99	169,130,149	4.99	1,181,319,834	199.6	91.67	4.99	8,646,683,523	369.63	334.02	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Melampaui target didorong oleh beberapa faktor antara lain : Masyarakat Balikpapan sudah semakin mengetahui dan mengawal Layanan PUSPAGA (dari sosial media, iklan radio, leaflet, dan mulai ke mulai) * Layanan PUSPAGA sudah ada di setiap Kecamatan se Kota Balikpapan * Tenaga Pemberi Layanan di PUSPAGA bertambah 1 orang sehingga menjadi 3 orang Psikolog Klinis * Instansi Pendidikan, Swasta, dan Organisasi Masyarakat semakin sering mengundang PUSPAGA untuk menjadi Pembicara di Kegiatan mereka * Layanan di PUSPAGA diberikan secara Gratis. Capaian berdasarkan jumlah klien yang mendapatkan pelayanan di Puspaga, Jumlah Keluarga yang mendapatkan pelayanan PUSPAGA / Total Keluarga di Kota Balikpapan : Keluarga yang mendapatkan Pelayanan tahun 2024 : 12808 dibagi Jumlah Keluarga di Bpp 256.651
1.3.1.1	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen					1	1,288,700,000	0	71,213,947	1	425,019,683	0	515,956,055	0	169,130,149	1	1,181,319,834	100	91.67				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Telah dilaksanakan di TV II; Jenis Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak berupa Media Cetak - Leaflet	



No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah	%	41.67	623,300,000	33,33	195,587,816	36.11	348,300,000	0	14,016,247	38.24	102,865,232	38.24	73,337,186	38.24	135,632,240	38.24	325,850,905	105.9	93.55	38.24	521,438,721	91.77	83.66	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Meningkatnya Kesadaran akan pentingnya data terpilah sebagai dasar pengambilan kebijakan yang responsif gender di kalangan pimpinan dan staf OPD. Hal ini diperkuat dengan adanya regulasi dan kebijakan yang mewajibkan pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran, dimana data terpilah menjadi instrumen kunci dalam prosesnya. Dukungan teknis yang intensif melalui pendampingan dan pelatihan telah meningkatkan kapasitas SDM di OPD dalam menumpulkan, mengolah, dan menyajikan data terpilah.
1.4.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Terlihat Penyediaan Data Terpilah	Jumlah	59	623,300,000	17	195,587,816	29	348,300,000	0	14,016,247	29	102,865,232	0	73,337,186	0	135,632,240	29	325,850,905	100	93.55	46	521,438,721	77.97	83.66	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
1.4.1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kelembagaan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen					1	348,300,000	0	14,016,247	0	102,865,232	0	73,337,186	1	135,632,240	1	325,850,905	100	93.55					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dokumen berupa Buku IPG
1.5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA	%	232	2,581,686,250	118	14,326,753,260	80	2,977,686,500	0	18,581,023	0	105,746,115	0	376,833,449	80	2,333,632,775	80	2,834,793,362	100	95.2	198	17,161,546,622	85.34	664.74	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Kota Layak melalui Rapat Koordinasi guna memenuhi rekomendasi dari Kementerian PPPA serta disesuaikan dengan evaluasi mandiri mengenai Kota Layak Anak
1.5.1	Pelebangan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan sebagai tindak lanjut dari hasil Evaluasi KLA oleh Kementerian PPPA yang disusun	dokumen	5	1,151,900,000	2	6,218,226,421	1	597,900,000	0	6,158,863	0	22,757,530	0	84,899,695	1	413,262,333	1	527,078,421	100	88.15	3	6,745,304,842	60	585.58	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Penyusunan Dokumen telah dilaksanakan untuk menjadi bahan evaluasi dan selanjutnya menjadi dasar Kementerian PPPA untuk melakukan verifikasi lapangan penilaian KLA
1.5.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	organisasi					25	597,900,000	0	6,158,863	0	22,757,530	25	84,899,695	0	413,262,333	25	527,078,421	100	88.15					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha telah tercapai dengan dilaksanakannya sosialisasi, pelatihan maupun bintek baik secara tatap muka maupun online/daring



1.5.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dibina	lembaga	120	1,429,786,250	36	8,108,526,839	25	2,379,786,500	4	12,422,160	0	82,988,585	0	291,933,754	21	1,920,370,442	25	2,307,714,941	100	96.97	61	10,416,241,780	50.83	728.52	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dibina tahun 2024 Yaitu : Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dibina : 1 PPATBM (34 PPATBM) ; 2) Forum Puspa; 3. PKK (7 PKK) ;4. UPPA Poldda ;5. GKK (RRA); 6. OPD; 7. Babas ;8. APSA (Asosiasi) Pengusaha Sahabat Anak); 9.BKPAKSI; 10. DMI ; 11.BNNK;12. Daycare;13. Polresta; 14. Sekolah ; 15. Kemenag;16. Forum Anak (41 FAB) ;17. SIGAB (Lembaga Pemerhati Anak); 18. Puskesmas ; 19. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) ; 20. Pengadilan Negeri; 21. Rumah Sakit 22. BUMN (PDAM) 23. Pengurus Balikpapan Islamic Centre 24. Yayasan Aisyah 25. Pondok Pesantren Jamiyatul Islamiah
1.5.2.1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen					1	2,379,786,500	0	12,422,160	0	82,988,585	0	291,933,754	1	1,920,370,442	1	2,307,714,941	100	96.97				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Dokumen telah disusun dan menjadi bahan penilaian evaluasi mandiri Kota Layak Anak	



No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d/ Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1.6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penyelesaian Penanganan Klien pada UPTD PPA	%	71.5	3,416,491,300	98,08	28,007,198,879	90	1,929,960,000	100	188,080,478	91,74	274,355,126	94,22	388,910,072	96,36	747,242,515	96,36	1,598,588,191	107,07	82,83	96,36	29,605,787,070	134,77	866,56	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Melampaui target dengan strategi mengupayakan SDM UPTD beserta perangkat DP3AKB untuk memberikan pelayanan di setiap aduan (keterlibatan bidang PA, PPP beserta Puspaga, serta membuka posko aduan selama libur natal dan tahun baru yang melibatkan pegawai ASN Non Sekretariat)
1.6.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Wilayah RT terpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak	%	6,4	860,200,000	13,90	5,287,742,516	11,43	760,200,000	8,46	80,956,761	10,54	166,719,523	10,54	265,872,607	19,00	203,399,629	19	716,948,520	166,23	94,31	19	6,004,691,036	296,88	698,06	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Perencanaan awal setiap kelurahan diwakili oleh 6 RT yang masing-masing terdiri dari 10 warga namun seiring berjalannya kegiatan dan kondisi lapangan, beberapa kelurahan mengirimkan lebih dari 6 RT dengan masing-masing RT diwakili oleh kurang dari 10 warga, sehingga jumlah RT yang terhitung lebih banyak
1.6.1.1	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Orang					2040	760,200,000	1020	80,956,761	1005	166,719,523	0	265,872,607	0	203,399,629	2025	716,948,520	99,26	94,31					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Perencanaan awal setiap kelurahan diwakili oleh 6 RT yang masing-masing terdiri dari 10 warga namun seiring berjalannya kegiatan dan kondisi lapangan, beberapa kelurahan mengirimkan lebih dari 6 RT dengan masing-masing RT diwakili oleh kurang dari 10 warga, sehingga jumlah RT yang terhitung lebih banyak
1.6.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%(Target Negatif)	0,009	2,150,000,000	0,058	22,556,601,573	0,011	840,000,000	0,031	107,123,717	0,043	107,635,603	0,06	123,037,465	0,074	288,838,261	0,074	626,635,046	-472,73	74,6	0,074	23,183,236,619	822,22	1078,29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	indikator ini merupakan indikator negatif, di mana semakin rendah capaiannya dibandingkan target justru menunjukkan kondisi yang semakin baik. Walaupun secara Tingkat capaian dihasilkan capaian yang negatif yang mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan signifikan dalam upaya menurunkan jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus tetapi di satu sisi menunjukkan bahwa masyarakat paham dan peduli terkait perlindungan perempuan dan anak; Semakin meningkatnya kepercayaan korban terhadap aparat perlindungan perempuan dan anak. Bertambahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada pihak yang berwajib. Gemarnya sosialisasi kepada masyarakat terkait Perlindungan Perempuan dan Anak serta keberadaan lembaga layanan penanganan kasus yang dikelola UPTD PPA Pemerintah Kota Balikpapan, membawa dampak semakin banyak warga/ korban yang berani melapor. TW IV per 31 Desember 2024 : (Jumlah anak yang ditangani oleh UPTD PPA : 182 dibagi oleh Jumlah Anak di Balikpapan : 244.548 dikali 100)



1.6.2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang					82	840,000,000	70	107,125,717	28	107,635,603	10	123,037,465	8	288,838,261	116	626,635,046	141.46	74.6					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Capaian Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan pengaduan pada tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian yang melebihi target ini mengindikasikan keberhasilan sistem layanan pengaduan dalam menjangkau dan memberikan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Adanya kemudahan akses, responsivitas petugas, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus yang memerlukan perlindungan khusus serta keterlibatan Masyarakat seperti PPATBM, Seksi PPART dan LPM serta Forum Anak untuk membantu memfasilitasi kejadian kekerasan yang menimpa anak perempuan. Tahun 2024 : Anak perempuan : 130, Anak laki laki : 52
1.6.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Terbina	lembaga	70	406,291,300	12	162,854,790	15	329,760,000	0	0	0	0	0	15	255,004,625	15	255,004,625	100	77.33	27	417,859,415	38.57	102.85	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dari target 15 (lima belas) Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Terbina telah dilaksanakan dan terdapat kegiatan baru berupa Anak Bakti untuk langkah awal memfasilitasi AMPK	



INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2023

NOMOR : 700/160/TIM-VI/ITKOT
TANGGAL : 29 MEI
TAHUN : 2024
TIM AUDIT : TIM VI
OBRIK : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BALIKPAPAN



DP3AKB
KOTA BALIKPAPAN



INSPEKTORAT
KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan BerAKHLAK
Nyaman Aman Berprestasi

EVALUASI AKIP 2023

DP3AKB KOTA BALIKPAPAN

Perencanaan Kinerja

21,05 dari nilai
maksimal 30,00



Pengukuran Kinerja

18,09 dari nilai
maksimal 30,00



Pelaporan Kinerja

9,83 dari nilai
maksimal 15



Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Internal 15,67
dari nilai maksimal 25



Nilai Total 64,64 dengan Predikat B (Baik)

Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Saran/Rekomendasi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja yang telah diperbaiki agar diformalkan dalam dokumen Renstra.
2. Melakukan pemantauan atas pencapaian target perencanaan kinerja dengan baik.
3. Menyusun definisi operasional yang jelas atas indikator kinerja ke 4 dalam IKU.
4. Memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi Reaksi) agar lebih maksimal dalam melakukan pengisian data kinerja.
5. Pengukuran kinerja yang telah dilakukan secara berkala (triwulan) dilengkapi dengan rekomendasi dan tindak lanjutnya.
6. Hasil pengukuran capaian kinerja terkait *reward and punishment* agar dapat diidentifikasi tingkat *reward and punishment*-nya, antara lain: pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja, yang mencapai target dan tidak mencapai target, yang selesai tepat waktu dan yang tidak tepat waktu, capaian diatas standar dengan yang standar.
7. Meningkatkan koordinasi dengan BPS sebagai sumber data pengukuran.
8. Laporan Kinerja yang telah disusun agar dipublikasikan secara luas (dapat diakses masyarakat umum)



